

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Aspek kehidupan tersebut terdiri dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut senantiasa diarahkan untuk pencapaian tiga sasaran utama pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis(Ketetapan MPR No. II/MPR/ 1993, UUD Pedoman dan Pengamalan Pancasila Ketetapan MPR No.II/MPR/1978, hal 92).

Dalam rangka mensukseskan pembangunan, pemerintah perlu mendorong kelancaran dan kelangsungan usaha perbankan dalam bidang pengerahan dana yang lebih besar dan diharapkan bersumber dari dalam negeri serta mengalokasikannya ke sektor yang produktif. Dengan demikian perbankan sebagai perantara keuangan dan sarana penunjang pembangunan menjadi semakin penting secara kuantitatif. mengingat hal tersebut dalam bisnis perbankan menuntut kepercayaan masyarakat agar tetap berkembang dengan baik yang dalam

ruang lingkupnya bukan hanya nasabah yang besar tetapi juga industri kecil, koperasi, dan kelompok usaha kecil terutama pada sistem pengeluaran kreditnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga keuangan mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara.

Untuk mewujudkan aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan, sektor usaha kecil menduduki peran yang strategis dalam pembangunan nasional, baik dilihat dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Tumbuhnya sektor perbankan nasional merupakan tujuan pemerintah agar bersama-sama dengan bank umum pemerintah mampu menjadi kompetitor yang tangguh dan sehat. Semakin besar dan sehatnya bank-bank pemerintah ini selanjutnya terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana dan program pemerintah dalam meningkatkan pembangunan disegala bidang.

Pembangunan nasional jangka panjang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi, dalam melaksanakan pembangunan nasional segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar pembangunan tersebut dapat berhasil. Untuk mengarahkan dana dan investasi tersebut, bank merupakan suatu media yang tepat yaitu melalui kegiatan perkreditan di berbagai jasa bank pada sektor perekonomian. Dan juga perbankan harus berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Peranan usaha kecil tidak saja penting dilihat dari sudut pandang aspek pengusaha yang bersangkutan, akan tetapi sangat penting juga dari aspek nasional, karena pada

umumnya perusahaan-perusahaan kecil adalah padat karya atau lebih banyak menyerap tenaga tenaga kerja. /

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pada tanggal 27 Oktober 1988, pemerintah mengeluarkan suatu deregulasi lanjutan yang dikenal dengan Pakto 88 yang pada dasarnya bertujuan antara lain dapat meningkatkan penerahan dana masyarakat. Selain untuk meningkatkan kemampuan perbankan dalam pemberian kredit pada kebijakan tersebut *reserves requirement* diturunkan dari sebesar 15 % menjadi 2 % sehingga pertumbuhan kredit diharapkan dapat meningkat(Insukindro,1993, hal. 68).

Bila dilihat dari perkembangan bank-bank di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah Pakto 88 maka akan terlihat begitu besar peran dunia perbankan dalam menyediakan kredit masyarakat. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kredit mempunyai kedudukan yang penting dalam ikut mensukseskan pembangunan, ini dapat dilihat dari peran sertanya dalam membantu meningkatkan kemajuan sektor ekonomi pada berbagai bentuk pemberian kredit modal kerja, investasi dan kredit konsumsi.

/ Sehingga dengan itu pemerintah antara lain menetapkan bahwa usaha pemerataan harus mencakup program untuk memberikan kesempatan pada usaha kecil dan menengah, guna memperluas dan meningkatkan usahanya dengan mengikut sertakan usahanya tersebut dalam ruang lingkup tanggung jawab yang lebih besar. Hal ini dilakukan antara lain dengan memperkuat permodalannya, meningkatkan ketrampilannya dan membantu pemasaran hasil produksinya./

/ Pencapaian sasaran pembangunan diupayakan melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah baik yang bersifat makro sektoral maupun regional. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah perkreditan yang merupakan bagian dari kebijakan moneter disamping kebijakan fiskal dan lainnya. Dengan demikian kebijakan perkreditan harus bersifat dinamis, sejalan dengan arah dan prioritas pembangunan. Oleh karena itu kebijaksanaan perkreditan yang ditempuh dalam berbagai tahapan pembangunan sejak PELITA I sampai dengan saat ini memiliki arah dan cirri-ciri yang berbeda sesuai dengan kondisi perekonomian dan perbankan pada umumnya termasuk kebijaksanaan kredit yang diterapkan bagi pembangunan usaha kecil dan koperasi. Kebijaksanaan pemenuhan yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1983, untuk meningkatkan efisiensi, mobilisasi dana masyarakat, profesionalisme dan kemandirian, juga untuk memantapkan stabilitas moneter guna mendukung proses penyesuaian perekonomian yang diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor swasta. Perkembangan KUK di DIY mulai tahun 1991 sampai tahun 1999 mempunyai kecenderungan meningkat dengan perkembangan rata-rata sebesar 12,59 % pertahun dan rata-rata perkembangannya sebesar 35,4935 juta rupiah pertahun.

Berdasarkan keadaan tersebut Bank Pembangunan Daerah (BPD) Yogyakarta yang mempunyai kebijakan manajemen keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, telah memberikan sarana kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan Kredit Usaha Kecil (KUK). Perkembangan KUK di BPD Yogyakarta pada 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup tinggi. Untuk

mengetahui perkembangan kredit usaha kecil oleh Bank Pembangunan Daerah dari tahun 1998 – 2002 dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan KUK Oleh BPD
Di Yogyakarta
1998 – 2002

| Tahun | KUK (dalam Juta) | Pertumbuhan (%) |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1998 | 146894,931 | - |
| 1999 | 140718,634 | - 4,20 |
| 2000 | 285343,194 | 102,77 |
| 2001 | 313947,225 | 10,02 |
| 2002 | 444053,139 | 41,44 |

Sumber : BPD Yogyakarta

Pada tabel 1.1 terlihat jelas pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2000 yang pertumbuhan mencapai 2 kali lipatnya pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 102,77 % atau sebesar 285,343 milyar dari 140,718 milyar pada tahun 1999. dan pada tahun 2001 menaik lagi menjadi 313,947 milyar, sampai dengan tahun 2002 mencapai 444,053 milyar.

Berdasarkan uraian diatas dan melihat perkembangan kredit usaha kecil di propinsi Yogyakarta maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul : “**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN DANA KREDIT USAHA KECIL OLEH BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) D.I. YOGYAKARTA TAHUN 1985 – 2002.**”

1.2. Perumusan Masalah

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyaluran dana kredit usaha kecil oleh Bank Pembangunan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah jumlah dana yang dihimpun Bank Pembangunan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap KUK di DIY ?
2. Apakah suku bunga kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran KUK BPD di DIY ?
3. Apakah PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap KUK BPD di DIY ?
4. Apakah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap KUK BPD di DIY ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang merupakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah jumlah dana yang dihimpun BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap KUK di DIY .
2. Untuk mengetahui apakah suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran KUK BPD di DIY.
3. Untuk mengetahui apakah PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap KUK BPD di DIY.
4. Untuk mengetahui apakah krisis moneter tahun 1997 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap KUK BPD di DIY.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi mahasiswa

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia. Hasil penelitian ini menjadi perbandingan antara ilmu yang penulis peroleh di bangku kuliah dengan kehidupan nyata di masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

1. Memberikan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan sektor industri kecil sebagai usaha guna meningkatkan PDRB
2. Sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta

1. Sebagai pertimbangan bagi pengambilan keputusan tentang langkah-langkah yang diambil dalam menentukan kebijaksanaan moneter oleh Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta.
2. Sebagai Bahan informasi dalam menentukan strategi untuk meningkatkan industri kecil.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, teori yang ada, tujuan penelitian dan dengan memperhatikan kejadian empiris, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. diduga jumlah dana yang dihimpun BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran KUK BPD di DIY.
2. diduga tingkat suku bunga kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran KUK BPD di DIY.
3. diduga PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap KUK BPD di DIY.
4. diduga krisis moneter pada tahun 1997 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap KUK BPD di DIY.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan data untuk mendukung dan membantu dalam pengambilan keputusan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada petugas yang bersangkutan yang dikerjakan secara sistematis.

2. Daftar Pertanyaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis yang ada hubungannya dengan variabel yang akan diteliti ditujukan kepada Bank Pembangunan Daerah dan lembaga lain yang terkait hubungannya dengan penelitian ini.

3. Studi Pustaka

Metode Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.6.2. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan baik data kualitatif maupun data kuantitatif yang relevan, terarah, dan bertujuan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder time series dari tahun 1985 – 2002, yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dalam penelitian ini (BPD Yogyakarta, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi analisa terhadap variabel dependen (yaitu : Kredit Usaha Kecil) serta variabel independen (yaitu : jumlah dana Bank Pembangunan Daerah yogyakarta, Suku Bunga Kredit, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Yogyakarta, krisis moneter tahun 1997).

1.6.3. Metode Analisis Data

1. Analisa deskriptif

Yaitu metode analisis dengan cara mendeskripsikan penulisan variabel-variabel yang berhubungan dengan permasalahan. Maksud dengan mendeskripsikan variabel-variabel ini adalah sebagai pendukung hasil dari analisis kuantitatif.

2. Analisis Kuantitatif

Yaitu metode analisis data dari hal-hal yang berhubungan dengan angka, dan menggunakan rumus-rumus serta teknik perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang sedang diteliti.

Analisis terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) oleh Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta (BPDY) menggunakan metode kuadrat terkecil (OLS) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat). Secara fungsional model tersebut dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, D)$$

Selanjutnya bentuk fungsi tersebut dapat diformulasikan secara sederhana sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 D$$

Dimana :

$$Y = \text{Kredit Usaha Kecil (juta rupiah)}$$

- X_1 = Jumlah Dana Bank Pembangunan Daerah (juta rupiah)
 X_2 = Suku Bunga Kredit (%)
 X_3 = PDRB (juta rupiah)
 D = Dummy variabel sebagai pengukur krisis ekonomi tahun 1997
 $D = 0$ sebelum ada krisis moneter pada tahun 1997
 $D = 1$ setelah ada krisis moneter pada tahun 1997
 β_0 = konstanta
 $\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi.

1.6.4. Pengujian Hipotesis

1.6.4.1. Analisis Varian (Uji F)

Untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh jumlah dana yang dihimpun BPDY, tingkat suku bunga kredit, PDRB, dan krisis moneter tahun 1997 secara bersama-sama berpengaruh terhadap kredit usaha kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan uji F (Gujarati,1993):

$$F = \frac{ESS / (k - 1)}{RSS / (n - k)}$$

Dimana:

F = Nilai F hitung

ESS = Jumlah kuadrat yang dijelaskan (*Estimated Sum of Square*)

RSS = Jumlah kuadrat residual (*Residual Sum of Square*)

k = Banyaknya variabel

n - Banyaknya pengamatan

Dengan derajat kepercayaan sebesar 95% ($\alpha = 5\%$) dan derajat kebebasan (df) sebesar $(k - 1) (n - k)$, maka:

Perumusan Hipotesis:

1). $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0,$

Artinya jumlah dana BPDY, suku bunga kredit, PDRB Yogyakarta, dan krisis moneter tahun 1997 secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit usaha kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2). $H_a : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0,$

Artinya jumlah dana BPDY, suku bunga kredit, PDRB, dan krisis moneter pada tahun 1997 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kredit usaha kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kriteria Pengujian:

$F\text{-hitung} < F\text{-tabel} (F \{ k - 1, n - k \}) \longrightarrow$ Ho diterima

$F\text{-hitung} > F\text{-tabel} (F \{ k - 1, n - 1 \}) \longrightarrow$ Ho ditolak

1.6.4.2. Uji t-test

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel-variabel penjelas terhadap variabel bebasnya secara individual.

Hipotesa yang diajukan :

$H_0 : \beta_i = 0; i = 1, 2, 3, \dots, k \rightarrow$ variabel independen tidak mempengaruhi
KUK BPD di DIY

$H_a : \beta_i > 0; i = 1, 2, 3, \dots, k \rightarrow$ variabel independen berpengaruh secara
positif terhadap KUK BPD di DIY

Dengan menggunakan tabel t- statistik, maka :

Jika t-hitung $< t(\alpha, n - k) \rightarrow$ H_0 diterima

Jika t-hitung $> t(\alpha, n - k) \rightarrow$ H_0 ditolak

t-hitung dirumuskan dengan (Gurati, 1993) :

$$t = \frac{\beta_j}{S\beta_j}$$

Dimana:

t = Nilai t hitung

β_j = Koefisien regresi ke j

$S\beta_j$ = Standar deviasi koefisien regresi ke j

Dengan derajat kepercayaan sebesar 95% ($\alpha = 5\%$) dan derajat kebebasan

(*df*) sebesar ($n - k$), maka:

Perumusan Hipotesis:

$H_0 : \beta_i = 0; i = 1, 2, 3, \dots, k \rightarrow$ variabel independen tidak mempengaruhi
KUK BPD di DIY

$H_a : \beta_I < 0; I = 1, 2, 3, \dots, k \rightarrow$ variabel independen berpengaruh secara negatif terhadap KUK BPD di DIY

Dengan menggunakan tabel t- statistik, maka :

Jika t-hitung $< t (\alpha, n - k) \rightarrow$ Ho diterima

Jika t-hitung $> t (\alpha, n - k) \rightarrow$ Ho ditolak

1.6.4.3. Koefisien Determinan Majemuk (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk menghitung seberapa besar variasi dari variabel tergantung dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Nilai R^2 berada diantara 0 sampai 1, dimana semakin dekat nilai R^2 dengan 1 menunjukkan R^2 yang semakin baik. Jika nilai R^2 sama dengan 1, maka garis regresi yang dicocokkan menjelaskan 100 persen variasi dalam Y. Sebaliknya, kalau nilai R^2 sama dengan 0, maka garis regresi tidak menjelaskan sedikitpun variasi dalam Y. Besarnya nilai R^2 dapat diperoleh dengan menggunakan rumus (Gujarati, 1988):

$$R^2 = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum y_i^2}$$

Dimana:

$\sum e_i^2 = \Sigma$ kuadrat residual (*Residual sum of squares*, RSS)

$\sum y_i^2 = \Sigma$ kuadrat total (*Total sum of squares*, TSS)

1.6.4.4. Test Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi (Damodar Gujarati, 1988) Jadi multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Konsekuensi dari multikolinieritas adalah sebagai berikut: Apabila ada kolinieritas sempurna diantara X, koefisien regresinya tak tertentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinieritas tingkatnya tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran koefisien regresi adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung untuk besar. Sebagai hasilnya, nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat.

Untuk mengetahui keberadaan multikolinieritas di antara lain dengan langkah pengujian terhadap masing-masing variabel independen dengan mengetahui seberapa jauh korelasinya (r^2) yang didapat dari hasil regresi bersama variabel independen dengan variabel dependen jika ditemukan nilai r^2 melebihi nilai R^2 pada model penelitian, maka dari model persamaan tersebut terdapat multikolinieritas, dan sebaliknya jika R^2 lebih besar dari semua r^2 maka menunjukkan tidak terdapatnya multikolinieritas pada persamaan yang diuji.

b. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari observasi ke observasi lainnya. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melakukan pengujian metode *Park*.

Adapun hipotesis yang diuji adalah :

H_0 : tidak terdapat heteroskedastisitas

H_a : terdapat heteroskedastisitas

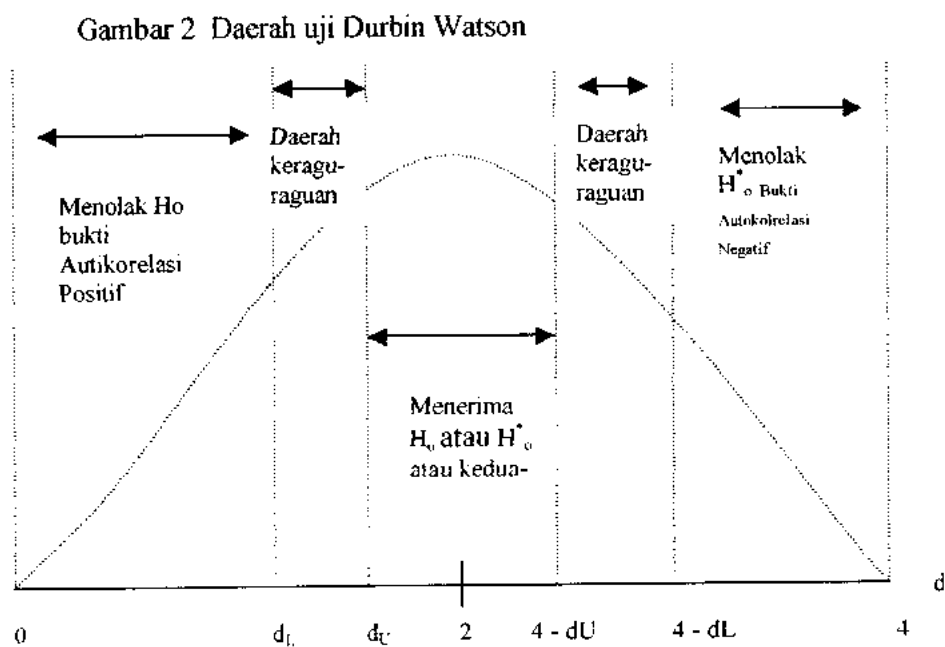
Jika hasil perhitungan menghasilkan t-hitung yang signifikan atau t-hitung $>$ t-tabel maka dapat dikatakan terdapat heteroskedastisitas atau H_0 ditolak jika t-hitung $<$ t-tabel maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas atau H_0 diterima. Metode Park dilakukan dengan cara meregres logaritma residual kuadrat terhadap semua variabel penjelas. Jika ada salah satu minimum koefisien regres maka terjadi heteroskedastisitas. Hal ini disebabkan karena transformasi yang memantapkan skala untuk pengukuran variabel mengurangi perbedaan antara kedua nilai.

c. Uji Autokorelasi

Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang (Damodar Gujarati;1988). Autokorelasi dapat timbul karena berbagai alasan. Sebagai contoh adalah inersia atau kelembaman dari sebagian besar waktu ekonomis, bias spesifikasi dari tidak dimasukkannya beberapa variabel yang relevan dari model

atau karena menggunakan bentuk fungsi yang tidak benar, fenomena Cobweb, tidak dimasukkannya variabel yang ketinggalan (*lagged*), dan manipulasi data.

Meskipun ada beberapa metode untuk mengetahui apakah serial korelasi terdapat dalam kejadian tertentu, yang paling terkenal diantaranya adalah statistik d dari Durbin Watson. Secara spesifik, Uji Durbin Watson dua sisi memiliki 5 kelompok atau 5 bagian daerah sebagaimana terlihat pada gambar 2 berikut ini.



Pengujian dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut , bahwa:

H_0 = tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif

H_a = ada autokorelasi

Maka statistik uji D-W adalah sebagai berikut :

1. Nilai d terbentang dari 0 sampai 4
2. Bila $d < d_L$ dan atau $d > 4 - d_U$,maka H_0 ditolak
3. Bila $d_U < d < 4 - d_U$ maka H_0 diterima

4. Bila $d_1 < d < 4-d-u$ atau $4-d < u < 4-d_1$ maka pengujian tidak menghasilkan kesimpulan

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah dan pembahasan masalah, tujuan dan manfaat serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi kinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan teori konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang deskripsi profil penelitian, gambaran umum perkembangan Kredit Usaha Kecil (KUK) oleh Bank Pembangunan Daerah di daerah Istimewa Yogyakarta dan perkembangan masing-masing variabel yang berhubungan dengan penelitian.

BAB IV : Analisa Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang teknik-teknik perhitungan yang dilakukan untuk membuktikan hipotesa yang dibuat dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda.

BAB V : Kesimpulan Dan Implikasi

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil dari analisis penelitian ini dan implikasi kebijakan yang dapat penulis ajukan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang masalah usaha kecil, penelitian tersebut antara lain,

1. Erwin (1998)

Penelitian tentang penyaluran KUK di Indonesia yang dilakukan dengan mengambil sampel tahun 1990 – 1995 memberikan kesimpulan antara lain :

- a) Pada suku bunga deposito ternyata variabel inflasi tidak memberikan pengaruh nyata yang signifikan terhadap tingkat suku bunga deposito (inflasi berpengaruh negatif terhadap suku bunga deposito)
- b) Suku bunga deposito berpengaruh negatif terhadap dana bank, hal ini dikarenakan dalam hal mencari upaya peningkatan dana bagi bank, pihak perbankan tidak hanya menggunakan instrumen suku bunga deposito untuk mencapai hal tersebut, tetapi juga menggunakan instrumen yang lain.
- c) PDRB berpengaruh positif terhadap dana bank, karena dengan adanya pendapatan masyarakat selain meningkatkan tingkat konsumsi juga meningkatkan tingkat bunga.

- d) Uang kartal berpengaruh positif terhadap jumlah bank, karena dengan meningkatkan uang kartal (kertas dan logam) di masyarakat berarti terjadi peningkatan kegiatan transaksi ekonomi, hal ini akan membawa dampak pada meningkatnya intensitas hubungan masyarakat dengan pihak perbankan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap penambahan jumlah dana bank.
- e) PDB Riil berpengaruh positif terhadap KUK
- f) Dana bank berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit bagi usaha kecil, dengan adanya kenaikan jumlah dana perbankan akan memberikan dampak terhadap kenaikan penyaluran kredit bagi sektor usaha kecil.

2. Udriani Bunga Maya Sari

Penelitian tentang “ Analisis Permintaan Kredit Investasi Pada Bank Umum Di Kabupaten Cilacap tahun 1987 – 2004 “ memberikan kesimpulan :

1. PRRB berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan kredit investasi di daerah Kabupaten Cilacap.
2. Suku bunga Riil mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap permintaan kredit Investasi di Kabupaten Cilacap.
3. Variabel dummy (krisis Moneter) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap permintaan kredit investasi di Kabupaten Cilacap

2.2. Kredit

2.2.1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani "credire" yang berarti kepercayaan, karena dasar dari kredit adalah kepercayaan dalam pemberian kredit terdapat dua pihak pemberi kredit dan penerima kredit, dengan demikian dapat diartikan kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak tertentu yang akan datang dengan suatu kontrak prestasi berupa bunga (M.Sinungan, 1987, Jakarta, Hal. 12).

Dalam aktifitasnya sebuah lembaga keuangan selalu mencakup dua kegiatan pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dari kedua kegiatan pokok ini dapat dilihat bahwa dari sisi menghimpun dana akan menimbulkan biaya dari lembaga keuangan sedangkan dari sisi penyaluran dana (kredit) menghasilkan pendapatan bagi lembaga keuangan tersebut. Berdasarkan aktivitas alokasi dana kredit tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kredit tersebut merupakan satu pendapatan yang dominan terhadap usaha suatu lembaga keuangan, sehingga pengelolaan dari kegiatan perkreditan harus ditangani dengan lebih baik.

Pengertian kredit menurut undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah : penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian kredit tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Proses penyaluran kredit tersebut telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai antara kedua belah pihak dan akan memenuhi kewajiban masing-masing. Dalam pemberian kredit tersebut terdapat kesepakatan pelunasan hutang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.
2. Dalam suatu pengerahan atau penyaluran uang dan juga tagihan yang berupa barang yang akan menimbulkan tagihan tersebut kepada lain dengan harapan dapat memberikan pinjaman, sehingga bank akan memperoleh suatu tambahan dari nilai pokok pinjaman tersebut berupa bunga sehingga pendapatan bagi bank yang bersangkutan.

2.2.2. Falsafah Kredit

Kredit adalah sebagai alat sumber pendapatan yang dominan bagi suatu bank. Akan tetapi disamping unsur tersebut kredit juga mempunyai unsur resiko (credit risk) yang akan muncul apabila kredit tersebut tidak dilunasi oleh si peminjam (debitur). Bank dalam hal ini akan menjalani kerugian apabila akibat dari tidak terbayarnya tagihan dari utang yang telah disalurkan pada pihak lain dalam bentuk kredit, hal tersebut dinamakan sebagai kredit macet.

Untuk menjaga keamanan dari kredit tersebut bank perlu berpedoman pada filsafah kredit yang dijadikan suatu pegangan awal dalam langkah pemberian kredit tersebut. (Ruddy Tri Santoso, 1995, Yogyakarta, Hal. 10)

1. Aman

Suatu kredit yang telah dilepas atau dicairkan harus jelas sasarannya, sehingga dapat diyakini bahwa sumber pelyunasan kredit itu benar-benar ada. Maka kejelasan saaran dan keyakinan tadi dapat diperoleh melalui suatu analisis yang akurat sehingga kredit yang dipinjamkan dapat kembali sesuai dengan perjanjian

2. Terarah

Kebijakan perokonomian negara akan berhasil apabila pelaksanaan yang ada itu telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam setiap peralihan dana pembiayaan yang berupa kredit bank yang disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat dan disetujui dengan mekanisme perkreditan, sehingga pelaksanaan perkreditan suatu bank harus juga diselaraskan dengan perekonomian yang menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi

3. Menghasilkan

Tujuan pokok suatu perusahaan maupun perbankan adalah kelancaran dalam kelangsungan hidup usahanay. Sehingga suatu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya perlu memperoleh pendapatan yang akan dapat membiayai suatu

aktivitasnya, juga dicadangkan untuk pengembangan usaha bank tersebut, sehingga usaha perkreditan yang merupakan sumber pendapatan bank harus diupayakan dapat menghasilkan pendapatan bunga yang wajar berdasarkan kalkulasi yang tepat dan terarah.

2.2.3. Prinsip Prinsip Pemberian kredit

Sebelum mengambil keputusan apakah usaha debitur layak atau tidak untuk dibiayai, maka usaha pertama harus dipastikan bahwa segala faktor berupa kelengkapan persyaratan harus dipenuhi oleh calon nasabah harus sudah dimiliki. Atas dasar inilah perlu dilakukan penyelidikan dan pertimbangan yang tepat agar dapat diberikan suatu pinjaman yang sehat. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi ditambah dengan pengalaman yang luas, maka tidak akan ditemui kesulitan dalam pemberian kredit, dimana prinsip-prinsip ini akan dituangkan kembali dalam laporan pembahasan kredit. Adapun prinsip-prinsip yang lazim dikenal dalam penilaian permohonan pemberian kredit adalah prinsip 5C dan ditambah 1C sebagai landasan moral, yaitu:

a. Character

Yaitu sifat-sifat positif dari pengurusan perusahaan yang tercermin berupa kemauan yang kuat dan rasa tanggung jawab atas setiap hal yang menjadi kewajibannya. Sifat-sifat tersebut berupa keterbukaan, jujur, bertanggung jawab, bermoral, tekun, hemat, efisien, dan lain-lain.

b. *Capacity*

Yaitu kemampuan dalam proses kepengurusan guan mengkombinasikan sumber daya manusia, bahan-bahan mentah, dan modal untuk memproduksi barang dan jasa sehingga memuaskan kebutuhan para konsumen serta mendatangkan penghasilan atau pendapatan. Sumber utama perlunasan kredit adalah kemampuan peminjam untuk meningkatkan penghasilan, kemampuan ini sanagt tergantung kepada tingkat pendidikan kesehatan, kecakapan, umur, stabilitas kerja dan pengelolaan sumber daya yang ada.

c. *Capital*

Berupa analisa modal untuk menggambarkan struktur modal, sehingga tanggung jawab pengusahapun menjadi lebih tinggi, apabila modal lebih besar. modal ini dapat berupa saham atau modal disekto, cadangan atau hutang kepada pemegang saham. Struktur ini dapat dilihat dari neraca dan bukti-bukti akuntansi lainnya

d. *Condition*

Adalah keadaan yang tercipta akibat dari pengembangan ekonomi, keuanagn,moneter, dan perbankan yang mempunyai dampak terhadap usaha peminjam. Jadi penilaian ini kan mempunyai bobot yang tinggi, bila dampak dari kondisi ekonomi yang relevan dengan bidang usaha dari peminjam kredit yang dapat diperhitungkan.

e. *Collateral*

Dalam hal ini jaminan dibagi dalam dua bentuk, yaitu jaminan utama (berupa proyek atau kegiatan usaha yang merupakan obyek kredit) dan jaminan tambahan yang berupa kekayaan sendiri atau pihak ketiga yang dianggap kuat untuk mengatasi keugian yang mungkin terjadi karena gagalnya usaha peminjam.

f. *Connstrait*

Adalah batasan-batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan seorang untuk melakukan bisnis disuatu tempat, walaupun semua prinsip 5 C dipenuhi atau cukup baik. Sebagai misal seseorang yang melakukan bisnis ternak babi yang bertmpatt didaerah dengan mayoritas muslim atau dekat dengan lingkungan perumahan penduduk, sehingga walaupun ia sudah memenuhi syarat 5 C, maka sebaiknya pihak bank tidak memberikan kredit kecuali jika nasabah tersebut mau melaksanakan bisnis dilokasi lain yang memenuhi persyaratan dari bank.

Prinsip-prinsip diatas sebaiknya satu sama lain dimiliki oleh calon debitur dalam posisi yang seimbang, artinya semua sama-sama memenuhi persyaratan, artinya tidak ada pengecualian terhadap prinsip-prinsip tersebut.

2.2.4. Kebijakan Perkreditan

Dalam menetapkan kebijakan kredit harus memperhatikan 3 (tiga) azas pokok yaitu:

1. Azas Likuiditas

Azas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari para nasabah atau dari masyarakat luas. Adapun kriteria yang dikatakan likuid adalah:

- Bank tersebut memiliki cash asset kebutuhan yang akan digunakan memenuhi likuiditasnya.
- Bank tersebut mempunyai asset lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengurangi nilai pasarnya.
- Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash asset baru melalui berbagai bentuk hutang.

2. Azas Pentabilitas

Dalam setiap kegiatan usaha semunaya akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistennya maupun untuk keperluan mengembangkan usahanya. Laba yang diperoleh dari perkreditan berupa selisih antara biaya dan dengan pendapatan bunga diterima dari para debitur. Termasuk juga selisih dari pendapatan bank yang dapat berupa pendapatan jasa dengan biaya operasional (over head) dari bank.

3. Azas Solvabilitas

Usaha pokok dari perusahaan adalah menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit. Dalam kebijakan

perkreditan bank harus pandai-pandai mengatur penanaman danaini baik dalam bidang perkreditan maupun surat-surat berharga, dengan pada satu tingkat resiko kegagalan sekeci mungkin, sebab asset bank dalam bentuk kredit dan penanaman dalam surat-surat berharga ini kakan merupakan sumber utama bagi bank untuk menutup segala hutang bank kepada para nasabah girant atau deponan, apabila sewaktu-waktu yang bersangkutan menarik danany dari bank tersebut.

Selain dari tiga azas diatas, maka bank tersebut juga harus memperhatikan pula faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan perkreditan yaitu:

- kemampuan manajemen bank
- peraturan-peraturan dari pengusaha monteter yang ada
- keadaan perekonomian dan perkembangan politik
- volume permintaan kredit dari masyarakat
- kemampuan bank yang bersangkutan dalam mengumpulkan danadengan biaya yang relatif lebih murah

2.2.5. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada para debitur, bank haruslah melihat dari segi keuangan atau analisis keuangan yang mencakup:

1. Liquidity ratio

Rasio likuiditas, digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan.

2. Leverage ratio

Rasio untuk mengukur seberapa jauh aktiva yang dibiayai dari hutang.

3. *Activity ratio*

Rasio untuk mengukur seberapa jauh efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber keuangan.

4. *Profitability ratio*

Rasio untuk menunjukkan hasil akhir yang dicapai manajemen dari setiap kebijakan dan keputusannya.

2.2.6. Jenis-jenis Kredit

Pada prinsipnya kredit itu hanya satu macam yaitu uang bank yang dipinjamkan pada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu dimasa mendatang, disertai dengan suatu kontrak prestasi berupa bunga, tetapi berdasarkan berbagai keperluan serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam. Banyaknya jenis-jenis kegiatan usaha yang ada dalam perekonomian masyarakat membawa pengaruh kepada variasi-variasi dari jenis-jenis kredit yang disediakan oleh perbankan . perbankan harus dapat mengalokasikan dana yang secara tepat atau sesuai dengan salah satu prinsip pembelanjaan yaitu “kebutuhan modal jangka pendek harus dipenuhi dengan sumber-sumber dana jangka pendek, begitu pula kebutuhan jangka panjang harus dipenuhi dengan sumber-sumber dana jangka panjang pula”.

Untuk menghindari diri dari kesalahan pemberian kredit, maka perbankan harus tahu setepat-tepatnya jenis kreditnya yang pada saat itu di

butuhkan oleh calon debitur. Untuk mengetahui hal-hal itu ada beberapa bentuk perkreditan yang dapat di tinjau dari berbagai segi: (M. Sinungan, Op,cit, hal. 163).

2.2.6.1. Kredit Modal Kerja

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Kriteria dari modal kerja ini adalah kebutuhan yang habis dalam satu cycle usahanya. Dalam neraca suatu perusahaan uang kas yang ditambah dengan piutang dagang yang ditambah dengan persediaan barang jadi maupun pesediaan barang dalam proses perediaan bahan baku. Dan apabila disebut dengan modal kerja bersih yaitu perlu dilunasi dengan *current liabilities*

2.2.6.2. Kredit Investasi

Kredit yang diberikan oleh perbankan untuk barang-barang modal yaitu yang tidak habis dalam satu cycle usaha, maksudnya proses dalam pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas tersebut memakan jangka waktu yang cukup lama setelah berbagai perputaran, misalnya seorang debitur mendapatkan jredit untuk mendirikan pabrik atau mesin, uang kas yang ia keluarkan untuk membeli barang-barang tersebut kan terhimpun kembali setelah melalui proses depresiasi sesuai dengan jangka waktu ekonomisnya (*ekonomical usefull life*), dimana dalam proses tersebut memakan waktu yang lama antara 5 – 20 tahun.

2.2.6.3. Personal Loan

Kredit yang diberikan kepada perorangan bukan dalam rangka untuk mendapatkan laba namun digunakan untuk keperluan konsumtif. Kredit ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti kulkas, tv, dll.

2.2.6.4. Kredit Investasi Kecil dan Modal Kerja Permanen

Dalam rangka penentuan kredit bagi sektor-sektor usaha golongan ekonomi lemah, maka oleh pemerintah dibukalah fasilitas-fasilitas kredit tersebut. Dalam kredit ini selain pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk permodalan juga pemberian pembinaan dalam bentuk strategi pemasaran maupun pembinaan manajemen. Fasilitas kredit tersebut diberikan dalam bentuk:

- kredit investasi kecil yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan kepada pengusaha kecil pribumi dengan berbagai fasilitas kemudahan dalam persyaratan dan prosedur yang khusus untuk pembiayaan barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan proyek maupun untuk pendirian-pendirian proyek baru.
- Kredit modal kerja permanen yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil pribumi dengan berbagai fasilitas kemudahan dan prosedur khusus guna memenuhi modal kerja yang dipergunakan secara terus menerus guna kelancaran usahanya.

2.2.6.5. Kredit Usaha Kecil

Khusus mengenai kredit usaha kecil (KUK) pada dasarnya KUK sama dengan kredit biasa, hanya pengelompokan kredit ini dilakukan menurut plafon kredit dan jumlah aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelompokan KUK terbagi 4 (empat) yang terdiri dari:

- a. Kelompok I, pengusaha yang memerlukan kredit dibawah Rp. 500.000
- b. Kelompok II, pengusaha yang memerlukan kredit antara Rp. 500.000 – Rp. 10 juta
- c. Kelompok III, pengusaha yang memerlukan kredit antara Rp. 10 juta – Rp. 25 juta.
- d. Kelompok IV, pengusaha yang memerlukan kredit antara Rp. 25 juta – Rp. 250 juta.

Kelompok I biasanya tidak langsung, misalnya disalurkan melalui LSM yang mengajukan proposal, juga disalurkan melalui kelompok swadaya masyarakat lainnya seperti Koperasi, sedangkan kelompok II – IV, persyaratannya lebih ketat biasanya sudah bisa diterapkan, meski relatif sederhana dibandingkan usaha menengah dan besar.

Sejak tanggal 4 Januari 2001, Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan tentang Kredit Usaha Kecil (KUK) yakni melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/2/PBI/2001 tentang "Pemberian Kredit Usaha Kecil" antara lain meliputi:

- (i) Bank diajarkan menyalurkan dananya melalui pemberian KUK.

- (ii) Bank wajib mencantumkan rencana pemberian KUK dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT),
- (iii) Bank wajib melaporkan pelaksanaan pemberian KUK dalam Laporan Bulanan umum.
- (iv) Bank wajib mengumumkan pencapaian pemberiak KUK kepada masyarakat melalui Laporan Keuangan Publikasi.
- (v) Plafon KUK disesuaikan menjadi Rp 500 juta per nasabah, (vi) bank yang menyalurkan KUK dapat meminta bantuan teknis dari Bank Indonesia.
- (vi) Pengenaan sanksi dan insentif dalam rangka pencapaian kewajiban KUK dihapuskan.

Jadi yang dimaksud dengan kredit usaha kecil ini adalah usaha yang mempunyai total asset maksimum 250 juta tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati.

2.2.7. Manfaat Kredit

Pihak-pihak yang mendapatkan manfaat atau kepentingan secara langsung adalah pihak bank dengan pihak calon debitur itu sendiri, karena kedua belah pihak inilah yang pertama akan menerima kegunaan atau manfaat perkreditan secara langsung. Sedangkan pemerintah dan masyarakat luas akan menerima manfaatnya secara tidak langsung.

2.2.7.1. Bagi Perbankan

Bank akan memperoleh berbagai manfaat antara lain: (Ibid, Hal: 57)

1. Memperoleh pendapatan bunga kredit bersih atau *interest margin* sering disebut *spread*.
2. Dengan memberikan kredit akan membantu memasarkan jasa-jasa perbankan lainnya seperti transfer, wesel, inkaso, tabungan, deposit, cek, dan konsultasi manajemen keuangan.
3. Untuk menjaga solvabilitas usahanya secara teknis struktur dana dari bank tersebut adalah terdiri dari para deposan baik *saving deposit* dan *time deposit*, semuanya mempunyai hak suatu waktu nanti akan mendapatkan tau menerima kembali dananya secara utuh ditambah sejumlah bunga tertentu.

2.2.7.2. Bagi Debitur

Beberapa keuntungan pemenuhan sumber-sumber dana dari pekreditan: (Ibid, Hal : 54)

1. Dengan kredit memudahkan para debitur untuk mengembangkan usahanya secara lebih luas.
2. Sebagai tempat untuk mendapatkan modal dan selektif lebih mudah diperoleh kalau memang usahanya betul-betul feasible
3. Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, administrasi expense) dapat diperkirakan dengan tepat, sehingga para pengusaha dapat menyusun rencana kerjanya untuk yang akan datang.

4. Dengan memperoleh kredit dari bank, debitur sekaligus juga akan memperoleh berbagai manfaat yaitu:
 - Fasilitas perbankan yang lebih murah dalam transfer, clearing, pembukaan I/C impor, bank garansi dan lain-lain.
 - Bank juga menyediakan fasilitas-fasilitas konsultasi pasar, manajemen, keuangan, teknis, yuridis, (dengan gratis) pula kepada debiturnya.

2.2.7.3. Bagi Pemerintah

Kepentingan Pemerintah terhadap kegiatan perkreditan dapatlah diuraikan sebagai berikut: (Ibid, Hal : 61)

1. Perkreditan sebagai sumber pendapatan negara.
2. Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter.
3. pemberian perkreditan sebagai alat untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
4. Penciptaan pasar yaitu dengan adanya kredit, maka akan semakin besar pula konsumsi dan volumenya sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap penciptaan pasar baru.

2.3. Pengertian Penghimpunan Dana Oleh Bank

Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun

dana (sementara) yang tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposito) sangat menentukan pertumbuhan bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pola volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang.

Dalam usaha menghimpun dana tersebut, bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat didalam lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda. Dalam garis besar sumber dana ada tiga, yaitu: (Sutojo, Siswanto, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta)

- a. Dana dari modal sendiri atau disebut dana dari pihak pertama yaitu dana dari modal bank sendiri yang berasal dari para pemegang saham yakni pemilik bank. Dana ini sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu:
 1. Modal yang disetor, yaitu sejumlah uang yang disetorkan secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank berdiri.
 2. Cadangan-cadangan yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup timbulnya resiko dikemudian hari.
 3. Laba yang ditahan atau Retained Earnig yang mestinya milik para pemegang saham, tapi oleh para pemegang saham itu sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal.

- b. Dana pinjaman dari pihak luar atau disebut juga dengan dana pihak kedua yaitu dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Dan dari pihak kedua yang memberikan pinjaman dana pada bank terdiri dari 4 (empat) :
1. Pinjamann dari bank-bank lain yang disebut dengan *call money*, yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh bank.
 2. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain dari luar negeri yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang.
 3. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman dari lembaga keuangan buakan bank (LKBB) ini kadangkala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit, tetapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo.
 4. Pinjaman dari bank sentral (BI) untuk membiayai usah-usah masyarakat yang tergolong prioritas, apalagi yang berprioritas tinggi seperti kredit investasi pada sektor-sektor yang harus ditunjang sesuai denangan penunjang dari program pemerintah yaitu PELITA (misalnya: pangan , pertanian, industri penunjang sektor pertanian, perhubungan, ekspor non migas, kredit-kredit dalam rangka peningkatan kehidupan masyarakat golongan ekonomi lemah , koperasi dan sebagainya), kredit produksi, dan modal kerja, serta kredit lainnya, sehingga Bank Indonesi akan memberikan bantuan dana yang dikenal dengan nama *kredit likuiditas*.

c. Dana dari masyarakat atau disebut juga dana dari pihak ketiga. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank adalah yang merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Ada 3 (tiga) jenis sumber dana terbesar yang dihimpun oleh bank, yaitu:

1. Giro (*demand deposit*) adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
2. Simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan pihak yang bersangkutan.
3. Tabungan, simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan syarat-syarat tertentu.

Tabungan menurut teori klasik adalah fungsi dari tingkat bunga semakin tinggi tingkat bunga makin tinggi pula minat masyarakat untuk menabung, artinya pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan

Investasi juga tergantung atau merupakan fungsi dari tingkat bunga, semakin tinggi tingkat bunga , keinginan untuk melakukan investasi akan semakin kecil, alasannya, apabila seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasi apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih

besar dari tingkat bunga yang harus ia bayarkan untuk dana investasi yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana (*cost of capital*). Semakin rendah tingkat bunga, biaya dalam penggunaan dana juga semakin kecil

Hubungan antara tingkat bunga deposito dengan jumlah dana bank yang terkumpul adalah tingkat suku bunga deposito tinggi, maka masyarakat akan tertarik untuk mendapatkan tambahan nilai atas sejumlah uang yang disimpan yang ditawarkan oleh pihak bank. Sebaliknya apabila tingkat suku bunga deposito rendah maka masyarakat akan enggan untuk menanamkan dananya pada bank karena nilai tambah dari nilai uang yang nantinya akan diterima kecil. Keadaan seperti di atas dapat terjadi dengan asumsi adanya stabilisasi yang baik pada sektor ekonomi, sosial, budaya dan politik. Jadi tingkat suku bunga deposito diharapkan mempunyai pengaruhnya positif terhadap sejumlah dana perbankan.

2.4. Teori tingkat bunga

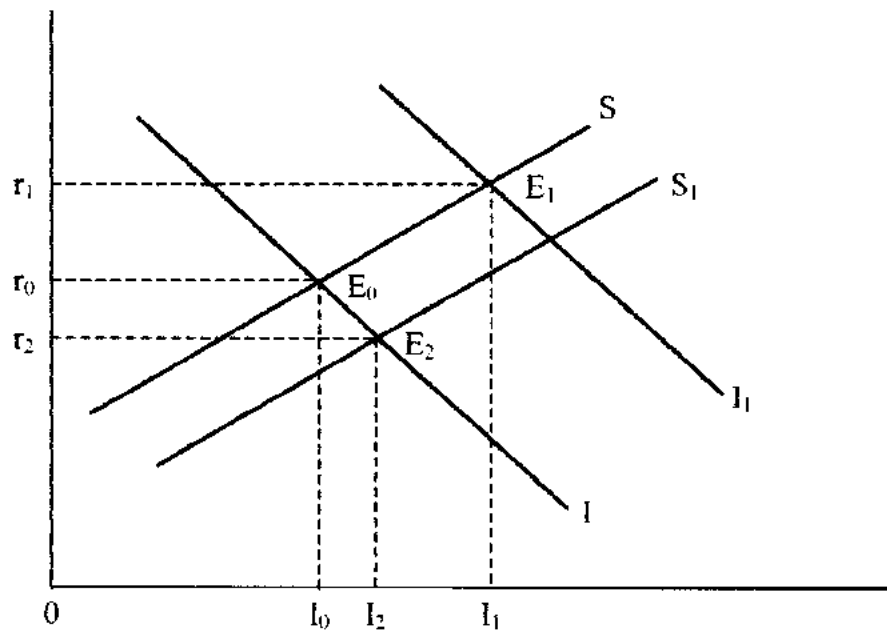
Aspek-aspek dari salah satu dimensi utama pasar uang adalah suku bunga. Dalam menganalisis faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga juga terdapat perbedaan pendapat diantara ahli-ahli ekonomi klasik dan *keynes*.

2.4.1. Teori Klasik

Menurut pandangan ahli ekonomi klasik tingkat bunga ditentukan oleh permintaan ke atas tabungan dan penawaran tabungan., tingkat bunga adalah harga yang terjadi dipasar dana. Investasi atau *loanable funds*,

maksudnya adalah didalam masyarakat terdapat keluarga penabung yaitu orang-orang yang berlebihan dan membentuk *supply* atau penawaran dan kelompok investor yaitu pengusaha yang memerlukan dan untuk operasi atau perluasan usahanya dan meeka membentuk *demand* tau permintaan, dan mereka bertemu dipasar *lonable funds* untuk proses tawar-menawar dengan menghasilkan tingkat bunga yang disepakati.

Gambar grafik 2.1



Analisis didapat adalah masing-masing penabung berperilaku seperti ini apabila tingkat bunga yang berlaku dipasar menaik maka jumlah dana yang ditawarkan kepasar naik sehingga semakin tinggi tingkat bunga semakin banyak *loanable funds* yang ditawarkan dipasar dan kurva *supply loanable funds* (kurva supply) menarik dari kiri kebawah kanan atas (Boediono, 1998, Yogyakarta, hal 80).

Kurva S dan I berturut-turut adalah kurva penawaran dana modal an permintaan dana modal. maka keseimbangan tercapai dititik E_0 dan ini menunjukkan bahwa jumlah dana modal yang akan diinventasikan adalah r_0 . Kalau dimisalkan permintaan ke atas dana modal berubah menjadi I_1 , sedangkan penawaran modal tetap sebesar S, keseimbangan berpindah ke E_1 yang berarti tingkat bunga naik dari r_0 menjadi r_1 dan dana yang diinventasikan bertambah dari I_0 menjadi I_1 . Dan apabila permintaan keatas dana modal tetap sebesar I tetapi penawarannya bertambah menjadi S_1 , maka keseimbangan berpindah ke E_2 . Dengan demikian perubahan tersebut menyebabkan tingkat bunga turun dari r_0 kepada r_2 dan dana yang diinventasikan bertambah menjadi I_2 .

Jadi dapat disimpulkan penawaran dana (S) bertemu dengan permintaan dana investasi (I) di pasar dana investasi (*loanable funds*) dan disitu tercipta tingkat harga (keseimbangan dimana $S = I$)

2.4.2. Pandangan Keynes

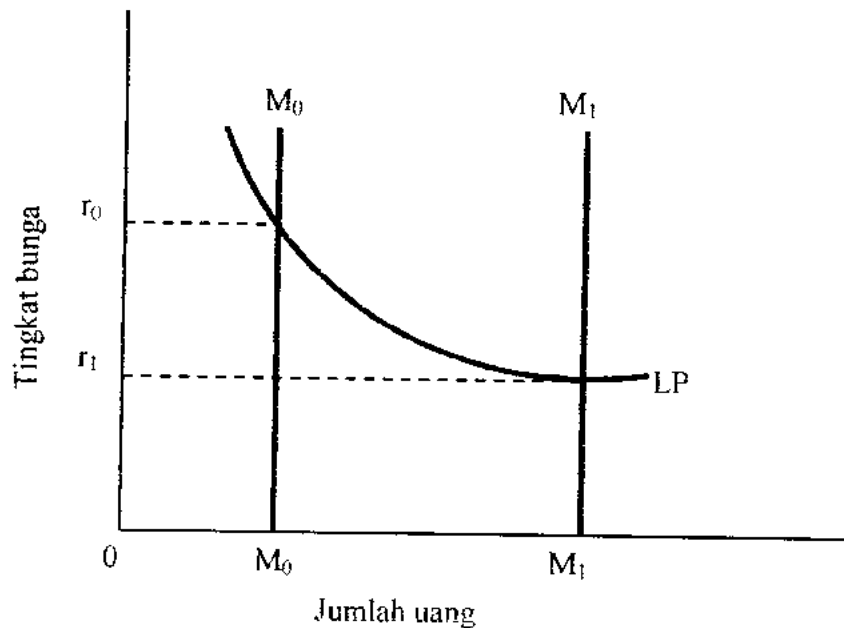
Ahli-ahli ekonomi sesudah klasik pada umumnya memberikan sokongan kepada pandangan keynes yang berkeyakinan bahwa tingkat bunga tergantung kepada sejumlah uang yang beredar dan *preferensi likwiditet* atau permintaan uang. Yang dimaksud dengan *preferen likwiditet* adalah permintaan keatas uang oleh seluruh masyarakat dalam perekonomian.

Keynes menyatakan bahwa permintaan uang oleh masyarakat mempunyai tiga motivasi/tujuan, yaitu: (Sadono Sukirno, 1994,)

1. Untuk transaksi, Masyarakat meminta uang untuk membayar konsumsi yang dilakukannya
2. Untuk berjaga-jaga, yaitu untuk menghadapi masalah yaang tidak terdug-duga, seperti kematian dan kehilangan pekerjaan
3. Untuk spekulasi, yaitu untuk ditanamkan ke saham-saham atau surat berharga lain

Penentuan tingkat bunag yang dikemukakan oleh keynes dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar Grafik 2.2



Kurva LP, atau kurva *preferensi likwiditet*, menggambarkan permintaan ke atas uang. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga tergantung kepada pendapatan masyarakat, yaitu makin tinggi pendapatan masyarakat maka semakin tinggi pula permintaan uang untuk

kedua-dua tujuan tersebut. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi tergantung kepada tingkat bunga, dan sifatnya adalah : pada waktu tingkat bunga tinggi hanya sedikit uang yang akan ditahan masyarakat untuk spekulasi tetapi kalau tingkat bunga rendah maka lebih banyak uang yang tidak dispekulasikan (jadi dipegang oleh pemiliknya).

Oleh sebab sifat permintaan uang untuk spekulasi yang seperti itu, kurva LP adalah seperti terdapat dalam gambar,. Kurva M_0 dan M_1 adalah jumlah uang dalam peredaran ; dan bentuknya elastis sempurna karena pada suatu waktu tertentu jumlah uang adalah tetap. Didalam gambar ditunjukkan bahwa pada waktu jumlah uang adalah M_1 tingkat bunga adalah r_1 . ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat bunga.

2.5. Cara-cara Perhitungan Bunga Kredit

Melihat dari cara-cara perhitungan kredit yang dibebankan kepada nasabahnya, cara perhitungan bunga kredit dapat dibedakan atas cara perhitungan sebagai berikut: (Thomas Suyatno..., dkk, Dasar-Dasar Perkreditan, 1995)

1. *Sliding Rate*

Yang dimaksud dengan cara perhitungan sliding rate adalah bahwa perbedaan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan semakin menurun dari bulan ke bulan (atau dari satu periode ke periode berikutnya) sesuai dengan menurunnya pokok pinjaman sebagai akibat adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman.

2. *Flate rate*

Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga dengan rumus *flate rate* adalah pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan tetap dari satu periode ke periode lainnya walaupun pokok pinjaman menurun sebagai akibat adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman.

3. *Floating rate*

Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga dengan rumus *floating rate* (bunga mengambang) adalah cara penentuan bunga yang besarnya tidak ditetapkan untuk suatu jangka waktu, namun diambangkan sesuai dengan perkembangan tingkat bunga yang ada dipasar uang (*money market rate*)

2.6. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada disuatau wilayah atau kabupaten, dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing total produksi bruto dari tiap-tiap kegiatan, sub sektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut penyajiannya dikelompokan menjadi lapangan usaha yaitu : 1. Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Pengalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Listrik, Gas dan Air Bersih, 5. Kontruksi, 6. Pedagangan, Hotel, dan Restoran, 7 Pengangkutan dan Komunikasi, 8. Keuangan, Penyewaan dan Jasa Jasa-jasa Perusahaan, 9. Jasa-jasa termasuk pelayanan pemerintah. PDRB adalah salah satu indikator

penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau kabupaten , baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Adapun hubungan antara PDRB dengan kredit adalah dengan kenaikan PDRB berarti konsumsi masyarakat naik sehingga perusahaan berusaha meningkatkan produksinya. Untuk meningkatkan produksinya berarti perusahaan tersebut membutuhkan modal investasi, modal tersebut dapat berasal dari kredit sehingga kenaikan PDRB akan menaikkan kredit perbankan dan juga sebaliknya.

2.7. Kondisi krisis Moneter

Deregulasi dan penerapan kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan sector moneter dan riil telah menyebabkan sektor perbankan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro di Indonesia. Mobilisasi dana melalui perbankan menjadi lebih besar dan perbankan menjadi lebih besar serta perbankan menjadi lebih besar peran sertanya dalam menunjang kegiatan di sektor riil melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Perkembangan perbankan yang cukup pesat pada masa setelah deregulasi ternyata tidak berlangsung cukup lama untuk dapat mengangkat Indonesia menjadi negara dengan tingkat kesejahteraan yang sama dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Perkembangan ini dalam waktu yang sangat singkat menjadi terhenti pada akhir tahun 1997 an. Krisis ekonomi yang pada awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perubahan dalam kondisi perbankan di seluruh tanah air kita ini. Salah satunya

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

3.1. Sejarah Bank BPD

Bank BPD DIY didirikan pada tahun 1961 tanggal 15 Desember, berdasarkan akta Notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Sebagai suatu perusahaan daerah, Bank BPD DIY diatur melalui peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976 yang telah disempurnakan dengan peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1985 dan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993. Terakhir kali disempurnakan dengan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Peraturan Nomor 7 Tahun 2000.

Tujuan Pendirian Bank adalah membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank BPD DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah/ menyimpan uang daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya sebagai bank umum sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undang.

3.1.1. Visi Dan Misi Bank BPD DIY

1. Visi

Mewujudkan terpenuhnya kebutuhan masyarakat khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan jasa perbankan maupun

jasa keuangan lainnya, terutama kredit skala kecil dan menengah, serta mendorong program pemberdayaan pekeonomian.

2. Misi

Bank BPD DIY sebagai Bank Umum, bertujuan memperoleh laba yang wajar melalui penyediaan jasa-jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama kredit skala kecil dan menengah serta mendorong pemberdayaan ekonomi daerah dalam upaya memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan daerah.

3.1.2. Kebijakan Manajemen

3.1.2.1 Keberpihakan Pada ekonomi Kerakyatan.

Bank BPD DIY selalu menjaga komitmen untuk mencapai visi dan misi sebagai bank yang mengembangkan perekonomian daerah ini ditejemahkan dalam artian yang luas, dengan melibatkan seluruh karyawan, pemegang saham, nasabah, dan masyarakat. Kebijakan untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah tersebut diterjemahkan sebagai keberpihakan kepada ekonomi rakyat, yaitu mengembangkan kegiatan koperasi, usaha kecil, mikro, dan menengah.

Komitmen ini diwujudkan dalam penyusunan strategi yang selalu sejalan dengan kegiatan pengembangan perekonomian daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tahun 2002 bank BPD DIY menetapkan strategi untuk fokus pada kelompok retail produktif dan dunia pendidikan. Selain itu, kami menetapkan kebijakan harga yang kompetitif, meningkatkan kualitas produk, mengejar ketinggalan di bidang teknologi informasi, membina hubungandengan

nasabah sebagai mitra bisnis. Kesemua itu ditujukan pada satu sasaran utama yaitu memberikan manfaat sehingga meningkatkan kepuasan nasabah.

3.1.2.2. Fokus Pada Kelompok Retail dan Dunia Pendidikan.

Kelompok usaha menengah kebawah terbukti sebagai kelompok yang paling kuat menghadapi krisis perekonomian. Akan tetapi kelompok ini sering diabaikan oleh kalangan perbankan. Bagi bank BPD DIY, pengembangan ekonomi kelompok usaha kecil dan menengah merupakan sebuah komitmen, karena ketahanan ekonomi bermula dari sini.

Kegiatan pendidikan merupakan salah satu ciri Yogyakarta. Komitmen untuk turut mengembangkan dunia pendidikan dilandasi dua pemikiran, pertama, pengembangan generasi penerus merupakan tanggung jawab kita semua, kedua, dunia pendidikan merupakan salah satu pendorong perekonomian di Daerah Yogyakarta.

3.1.2.3. Kebijakan Harga

Bank BPD memiliki komitmen untuk selalu memberikan harga yang wajar kepada nasabahnya. Atas dasar tersebut, penetapan tingkat bunga baik untuk menghimpun dana masyarakat maupun menyalurkan kredit selalu mengacu pada harga yang berlaku. Namun demikian, kebijakan harga selalu ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, masyarakat, nasabah, dan bank.

3.1.2.4. Kualitas Produk

Bank BPD mengartikan produk secara luas. Apapun yang dirasakan oleh nasabah maupun masyarakat menyangkut Bank BPD DIY adalah produk. Karenanya pengembangan kualitas produk diartikan pula secara luas, sehingga

apabila Bank BPD akan mengembangkan produk, semua dimulai dari apa yang dirasakan oleh nasabah dan masyarakat.

Komitmen terhadap kualitas produk ini antara lain diwujudkan dalam peningkatan kualitas pelayanan, penambahan fasilitas baru, dan penambahan jaringan baru, sehingga masyarakat dan nasabah merasakan adanya tambahan manfaat sehingga meningkatkan kepuasan nasabah.

3.1.2.5. Teknologi Informasi.

Teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Apa yang beberapa waktu lalu dianggap sebagai keunggulan teknologi, pada saat ini dapat dianggap ketinggalan. Bank BPD DIY menyadari hal tersebut, tahun 2001 BPD DIY mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Tahun 2002 BPD menyempurnakan sarana komunikasi antar cabang yang telah dirintis sejak tahun 2001. Setelah peningkatan kualitas jaringan komunikasi, tahun 2001 bank BPD DIY telah menambahkan fasilitas ATM. Pada tahun-tahun mendatang, fasilitas ATM ini akan terus ditambah sehingga makin memudahkan nasabah melakukan transaksi.

3.1.2.6. Nasabah Sebagai Mitra

BPD DIY menyadari bahwa keberhasilan tidak akan datang hanya dari satu sisi, Bank BPD DIY mendudukan setiap nasabah sebagai rekan bisnis untuk mencapai tujuan bersama. *Corporate statement*, artinya BPD, masyarakat, nasabah, pemegang saham, dan seluruh karyawan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.

3.1.2.7. Kepuasan Nasabah Sebagai Sasaran.

Setiap strategi yang dibangun di BPD DIY memiliki satu muara, yaitu kepuasan nasabah. Tanpa kepuasan nasabah, BPD DIY tidak dapat berkembang, rencana nasabah terganggu, dan kekecewaan merupakan kerugian besar yang sulit untuk diganti. Itulah sebabnya, setiap tahun bank melakukan penelitian untuk mengukur kepuasan nasabahnya.

3.1.3. Jaringan Pelayanan

Tahun 2002 BPD Yogyakarta membuka 4 jaringan pelayanan baru, yaitu kantor Kas Balaikota Yogyakarta, Kantor Kas Pasar Bantul, Kantor Kas Pemda Bantul, Kantor Kas Malioboro. Pembukaan kantor kas baru ini bertujuan untuk makin meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Dengan penambahan tersebut, Bank BPD DIY telah memiliki 60 kantor, yang terdiri 1 kantor pusat, 1 kantor cabang utama, 5 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, dan 40 kantor kas. Di masa mendatang jumlah jaringan pelayanan ini akan terus dikembangkan sehingga akan mendekatkan Bank BPD DIY dengan masyarakat. Selain itu, Bank juga akan meningkatkan kualitas jaringan komunikasi antar kantor sehingga kualitas pelayanan di setiap kantor semakin meningkat.

3.2. Perkembangan Kredit Usaha Kecil

Sejalan dengan pesatnya kemajuan ekonomi dan bisnis di Propinsi Yogyakarta menjadikan system perkreditan semakin penting. Untuk melihat

perkembangan Kredit Usaha Kecil secara jelas dapat dilihat tabel 3.2 . Pada tabel 3.2 menunjukkan pertumbuhan jumlah kredit usaha kecil oleh BPD di DIY dari tahun 1985 –2002 mempunyai kecenderungan selalu meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,03 % per tahun dan rata-rata perkembangannya 20.812,67 juta rupiah pertahun.

Peningkatan jumlah KUK BPD terbesar pada tahun 2000, yaitu sebesar 102,77 persen. Penurunan jumlah kredit terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1999. Besarnya penurunan jumlah kredit tahun 1998 adalah 35.339,44 juta rupiah atau persentase penurunannya dari tahun sebelumnya sebesar 19,39 %, begitu pula untuk tahun 1999 menurun sebesar 6.176,297 juta rupiah atau penurunannya sebesar 4,20 %. Walaupun pada tahun 2000 mengalami meningkat, sebesar 285.343, 194 Juta rupiah. Dan kemudian diikuti juga pada tahun 2001 dan 2002 sebesar 313.947,225 juta rupiah dan 444.053, 139 rupiah atau perkembangannya sebesar 10,02 persen dan 41,44 persen. Fenomena terjadinya penurunan kredit ini dapat merupakan cerminan dari tiga faktor yang masing-masing dapat memberikan implikasi kebijakan yang berbeda-beda (Laporan Tahunan Bank BPD, Tahun 2001) . Faktor pertama kemampuan (*ability*) perbankan untuk menyalurkan kreditnya terhambat karena keharusan untuk memenuhi kecukupan modal (*capital crunch*) atau terjadi *rush* terhadap bank yang menghambat kemampuan bank menyalurkan pinjaman. Faktor kedua kemauan (*willingness*) perbankan untuk menyalurkan kredit menjadi menurun bila kegiatan penyaluran kredit dianggap sangat beresiko tinggi dan resiko tersebut tidak dapat diimbangi

dengan suku bunga, sedangkan faktor ketiga lemahnya permintaan kredit karena lemahnya kegiatan perekonomian

Tabel 3.1.

Perkembangan Kredit Usaha Kecil Bank BPD DIY

| Tahun | Jumlah KUK (Juta Rupiah) | Perkembangan (Juta Rupiah)* | Perkembangan (%)* |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1985 | 69.443,032 | | - |
| 1986 | 79.322,044 | 9.879 | 14,22 |
| 1987 | 80.132,432 | 810,388 | 1,02 |
| 1988 | 95.108,642 | 14.976,21 | 18,68 |
| 1989 | 119.819,093 | 24.710,45 | 25,98 |
| 1990 | 125.532,482 | 5.713,39 | 4,76 |
| 1991 | 130.116,436 | 4.583,95 | 3,65 |
| 1992 | 128.663,313 | - 1453,12 | - 1,12 |
| 1993 | 132.446,334 | 3.783,021 | 2,94 |
| 1994 | 138.633,531 | 6.187,197 | 4,67 |
| 1995 | 150.538,335 | 11.904,804 | 8,58 |
| 1996 | 176.961,351 | 26.423,016 | 17,55 |
| 1997 | 182.234,371 | 5.273,02 | 2,98 |
| 1998 | 146.894,931 | - 35.339,44 | - 19,39 |
| 1999 | 140.718,634 | - 6.176,297 | 4,2 |
| 2000 | 285.343,194 | 144.624,56 | 102,77 |
| 2001 | 313.947,225 | 28.604,031 | 10,02 |
| 2002 | 444.053,139 | 130.105,914 | 41,44 |
| Rata-rata | | 20.812,617 | 13,03 |

Sumber : Bank BPD DIY

* Data Olahan

Data diolah

3.3. Perkembangan Dana Yang terhimpun

Pertumbuhan kekayaan bank BPD pada tahun belakangan ini mengalami kenaikan, pihak BPD mampu menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan yaitu melalui kredit. Penghimpunan dana yang ada yang melalui

bentuk giro, tabungan, dan deposito mampu menghimpun dana yang cukup besar guna perkembangan pertumbuhan bank BPD itu sendiri.

Perkembangan pertumbuhan dana yang dihimpun oleh bank BPD pada tahun 1985 –2002 dapat dilihat pada tabel 3.3. dibawah ini

Tabel 3.2.
Perkembangan Penghimpunan Dana Bank BPD

| Tahun | Jumlah KUK (Juta Rupiah) | Perkembangan (Juta Rupiah)* | Perkembangan (%)* |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1985 | 101.232,360 | - | - |
| 1986 | 118.649,997 | 17.417,636 | 17,20 |
| 1987 | 136.192,705 | 17.542,709 | 14,78 |
| 1988 | 157.790,065 | 21.597,36 | 15,86 |
| 1989 | 171.468,729 | 13.678,664 | 8,66 |
| 1990 | 201.295,412 | 29.826,683 | 17,38 |
| 1991 | 221.107,109 | 19.811,697 | 9,84 |
| 1992 | 228.055,281 | 6.948,172 | 3,14 |
| 1993 | 279.189,009 | 51.133,727 | 22,42 |
| 1994 | 311.400,435 | 32.211,427 | 11,53 |
| 1995 | 345. 827,737 | 34.427,301 | 11,05 |
| 1996 | 381.921,147 | 36.093,411 | 10,43 |
| 1997 | 453.295,141 | 71.373,993 | 18,68 |
| 1998 | 203.750,876 | - 249.544,264 | - 55,05 |
| 1999 | 200.178,837 | - 3.572,039 | - 1,75 |
| 2000 | 385.220,204 | 185.041,367 | 92,43 |
| 2001 | 649.142,935 | 263.922,731 | 68,51 |
| 2002 | 859.239,019 | 210.096,084 | 32,51 |
| Rata-rata | | 42.111,48 | 16,53 |

Sumber : BPD D.I. Yogyakarta

* Data olahan
Data diolah

Peningkatan jumlah dana yang dihimpun BPD terbesar terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 92,43 % atau pertumbuhannya sebesar 185.041,367 juta rupiah. Sedangkan terendah terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar – 55,05 %, atau penurunannya pertumbuhannya sebesar 249.544,264 juta rupiah. Sedangkan rata-rata perkembangan pertumbuhan dana yang terhimpun dari tahun 1985 –2002

yaitu sebesar 42.111,48 juta rupiah per tahun atau rata-rata perkembangannya sebesar 16,53 % pertahun.

3.4. Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta

Secara nasional, perbaikan ekonomi pasca krisis sudah nampak beberapa tahun terakhir, meskipun masih diwarnai kondisi politik yang belum kondusif. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang ekonomi memberikan tanda kearah ekonomi yang lebih baik. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan sektor ekonomi di D.I Yogyakarta dari tahun 1998 -2002 dapat dilihat di tabel 4.4 di bawah ini.

Laju pertumbuhan seluruh sektor ekonomi Yogyakarta pada tahun 1998 – 2002 dapat dilihat . Tahun 1998, dimana tahun tersebut menjadi puncak krisis moneter, hampir semua sector mengalami laju pertumbuhan negatif kecuali sektor listrik, gas dan air minum. Dalam tahun 1999 ditandai dengan membaiknya perekonomian, seluruh sektor ekonomi berhasil bangkit dengan laju pertumbuhan positif, kecuali sektor jasa-jasa. Dan tentunya PDRB mengalami kenaikan 2,96 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya tahun 2000 sampai tahun 2002 seluruh sektor ekonomi sudah menunjukkan pertumbuhan kearah positif.

Pada tahun 2002, sektor keuangan, persewaan dan jasa mengalami pertumbuhan yang paling besar di bandingkan sektor ekonomi lainnya, yaitu sebesar 11,03 persen. Sedangkan sector pertanian merupakan sektor dengan pertumbuhan yang paling rendah sebesar – 5, 7 persen. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian

disebabkan kurang bagusnya musim dan iklim yang terjadi pada tahun 2002 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.3.
Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Yogyakarta
(%)

| No | Sektor | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----|---|---------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 1 | Pertanian | - 5,38 | - 5,5 | 10,22 | - 1,6 | - 5,75 |
| 2 | Pertambangan | - 15,79 | 0,37 | 0,103 | 0,60 | 0,17 |
| 3 | Industri Pengolahan | - 6,01 | 3,43 | - 2,69 | 2,01 | 4,08 |
| 4 | Listrik, Gas, dan Air Minum | 0,18 | 12,46 | 7,88 | 2,30 | 3,95 |
| 5 | Bangunan | - 32,83 | 3,21 | 4,59 | 2,87 | 10,35 |
| 6 | Pedagangan, hotel, dan Restoran | - 10,35 | 2,48 | 4,02 | 6,95 | 1,95 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | - 8,79 | 2,13 | 10,27 | 10,39 | 5,02 |
| 8 | Keuangan, Persewaan, dan jasa Perusahaan | - 7,05 | 0,67 | - 1,22 | 3,61 | 11,03 |
| 9 | Jasa-jasa | - 12,47 | 2,32 | 2,67 | 1,54 | 4,21 |
| | PDRB Total | -11,36 | 2,96 | 4 | 3,28 | 3,38 |

Sumber : BPS Yogyakarta

Pertumbuhan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto D.I. Yogyakarta dari tahun 1985 – 2002 dapat dilihat pada tabel 3.5. di bawah ini. Dimana pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 1993 yaitu sebesar 12,48 %, atau sebesar 4.058.028 jutaan rupiah, ini naik dari 3.607.777 juta rupiah pada tahun 1992. sedangkan penurunan pertumbuhan yang paling kecil terjadi pada tahun

1998 yaitu sebesar -11,36 persen atau sebesar 4.685.772 juta rupiah ini turun dari 5.286.367 juta rupiah pada tahun 1997.

Penurunan ini terjadi akibat krisis ekonomi moneter yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan berpengaruh besar terhadap PDRB di setiap Propinsi Indonesia. Namun setelah krisis tersebut perlahan-lahan pertumbuhan ekonomi Yogyakarta mulai naik berturut yaitu sebesar 2,96 %, dan 4 % pada tahun 1999 dan 2000. Walaupun tahun 2001 turun menjadi 3,28 % dan 3,28 pada tahun 2001 dan 2002, atau sebesar 5.128.544 juta rupiah menjadi 5.357.669 juta rupiah.

Tabel 3.4
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 1993
Tahun 1985 - 2002

| Tahun | PDRB (Jutaan Rupiah) | Pertumbuhan (%)* |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1985 | 3.959.434 | |
| 1986 | 3.765.801 | - 4, 89 |
| 1987 | 3.899.325 | 3,54 |
| 1988 | 3.828.689 | - 1,81 |
| 1989 | 3.818.601 | 0,26 |
| 1990 | 3.880.680 | 1,62 |
| 1991 | 3.857.807 | - 0, 59 |
| 1992 | 3.607.777 | - 6, 48 |
| 1993 | 4.058.028 | 12,48 |
| 1994 | 4.357.906 | 7,39 |
| 1995 | 4.741.903 | 8,81 |
| 1996 | 5.111.563 | 7,79 |
| 1997 | 5.286.367 | 3,42 |
| 1998 | 4.685.777 | - 11,36 |
| 1999 | 4.824.445 | 2,96 |
| 2000 | 5.017.709 | 4 |
| 2001 | 5.182.544 | 3,28 |
| 2002 | 5.357.669 | 3,38 |
| Rata-rata | | 1,84 |

Sumber : BPS Yogyakarta

*** Data olahan**

Data diolah

Secara keseluruhan pertumbuhan PDRB dari tahun 1985 – 2002 rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,84 % pertahun

3.5. Perkembangan Tingkat Suku Bunga

Perkembangan suku bunga yang terjadi pada dasarnya merupakan refleksi dari kekuatan permintaan masyarakat akan kredit dan penawaran dana bank, sedangkan di Indonesia masih mengalami kesenjangan antara kesediaan tabungan masyarakat yang umumnya mengalami defisit..

Di tabel 4.6. dibawah ini dapat dilihat perkembangan pertumbuhan tingkat suku bunga kredit oleh BPD di DIY.

Tabel 3.5.
Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit
Yogyakarta

| Tahun | Tingkat suku Bunga Kredit (%) | Perkembangan (%)* |
|-----------|-------------------------------|-------------------|
| 1985 | 19,5 | |
| 1986 | 18,2 | - 1,3 |
| 1987 | 19 | 0,8 |
| 1988 | 19,7 | 0,7 |
| 1989 | 19,3 | - 0,4 |
| 1990 | 19,2 | - 0,1 |
| 1991 | 19,28 | 0,08 |
| 1992 | 19,21 | - 0,07 |
| 1993 | 17,06 | - 2,15 |
| 1994 | 14,96 | - 2,1 |
| 1995 | 15,75 | 0,79 |
| 1996 | 16,42 | 0,67 |
| 1997 | 17,34 | 0,92 |
| 1998 | 23,16 | 5,82 |
| 1999 | 17,8 | - 5,36 |
| 2000 | 17,4 | -2,24 |
| 2001 | 16,8 | -3,44 |
| 2002 | 17,02 | 1,3 |
| Rata-rata | | - 0,33 |

Sumber : Bank BPD DIY

* Data olahan
Data diolah

Kenaikan tingkat suku bunga mengalami puncaknya pada bulan agustus 1998, setelah BI mengubah system lelang SBI pada akhir bulan juli 1998. sejak oktober 1998, sejalan dengan berangsur-angsur pulihnya stabilitas moneter suku bunga mulai bergerak turun. Perkembangan positif ini dilatar belakangi oleh membaiknya ekspektasi masyarakat akan stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, seiring dengan semakin efektifnya pengendalian uang beredar (Bank Indonesia,1998).

Perkembangan tingkat suku bunga kredit di DIY mulai tahun 1985 sampai tahun 2002 terendah terjadi pada tahun 1994 yaitu sebesar 14,96 % dan tertinggi pada tahun 1998 yaitu sebesar 23,16 %. Rata-rata perkembangan tingkat suku bunga perbankan sebesar 0,33 % per tahun. Adanya kenaikan atau penurunan suku bunga kredit ini sangatlah dipengaruhi oleh keadaan perekonomian namun pada saat itu dimana besarnya suku bunga kredit sangat tergantung dari kebijaksanaan tiap-tiap bank. Besarnya tingkat suku bunga kredit pada tahun 1998 lebih cenderung diakibatkan oleh kemerosotan kondisi perekonomian Indonesia secara global.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Diskriptif Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series atau data runtun waktu sebyak 18 observasi dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2002, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kredit Usaha Kecil Bank BPD di D.I. Yogyakarta yang dinyatakan dalam juta rupiah yang diperoleh dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Yogyakarta, adapun variable independennya adalah :

a. Dana Yang dihimpun BPD

Dana Yang dihimpun BPD yaitu berasal dari Giro, Tabungan, dan Deposito.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan adalah PDRB atas Harga konstan tahun 1993.

c. Tingkat Suku Bunga Kredit

Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku bunga kredit, yang dinyatakan dalam persen.

d. Variabel Dummy (Krisis Moneter)

Variabel Dummy yang digunakan adalah kondisi krisis moneter, dimana sebelum tahun 1997 adalah kondisi sebelum krisis moneter dan tahun 1997- sampai tahun 2002 adalah kondisi sesudah krisis moneter.

Tabel 4.1
Data Penelitian
1985 –2002

| Tahun | KUK (juta) (Y) | Dana Yg Terhimpun (Juta) (X1) | SukuBunga Kredit (%) (X2) | PDRB (Juta) (X3) | Dummy (X4) |
|-------|--------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|
| 1985 | 69.443,032 | 101.232,360 | 19,5 | 3.959.434 | 0 |
| 1986 | 79.322,044 | 118.649,997 | 18,2 | 3.765.801 | 0 |
| 1987 | 80.132,432 | 136.192,705 | 19 | 3.899.325 | 0 |
| 1988 | 95.108,642 | 157.790,065 | 19,7 | 3.828.689 | 0 |
| 1989 | 119.819,093 | 171.468,729 | 19,3 | 3.818.601 | 0 |
| 1990 | 125.532,482 | 201.295,412 | 19,2 | 3.880.680 | 0 |
| 1991 | 130.116,436 | 221.107,109 | 19,28 | 3.857.807 | 0 |
| 1992 | 128.663,313 | 228.055,281 | 19,21 | 3.607.777 | 0 |
| 1993 | 132.446,334 | 279.189,009 | 17,06 | 4.058.028 | 0 |
| 1994 | 138.633,531 | 311.400,435 | 14,96 | 4.357.906 | 0 |
| 1995 | 150.538,335 | 345.827,737 | 15,75 | 4.741.903 | 0 |
| 1996 | 176.961,351 | 381.921,147 | 16,42 | 5.111.563 | 0 |
| 1997 | 182.234,371 | 453.295,141 | 17,34 | 5.286.367 | 1 |
| 1998 | 146.894,931 | 203.750,876 | 23,16 | 4.685.777 | 1 |
| 1999 | 140.718,634 | 200.178,837 | 17,8 | 4.824.445 | 1 |
| 2000 | 285.343,194 | 385.220,204 | 17,4 | 5.017.709 | 1 |
| 2001 | 313.947,225 | 649.142,935 | 16,8 | 5.182.544 | 1 |
| 2002 | 444.053,139 | 859.239,019 | 17,02 | 5.357.669 | 1 |

Sumber : Bank BPD Yogyakarta dan BPS (data diolah)

Pada tabel 4.1 bisa dilihat perkembangan Kredit Usaha Kecil (KUK) pada Bank BPD. Pada tahun 1985 sampai 2002 mengalami kenaikan, tahun 1998 mengalami penurunan, penurunan ini terjadi akibat krisis moneter, penurunan ini sebesar 146.894,643 juta rupiah dari 182.234,371 juta rupiah. Dampak dari krisis ini ternyata cukup lama bagi BPD Yogyakarta. Untuk perbankan secara nasional pada tahun 1999 penyaluran KUK mulai ada peningkatan tapi tidak di BPD Yogyakarta ini

karena terlihat secara jelas permintaan kredit semakin menurun pada tahun 1999 menjadi 140.718,634 juta rupiah kemudian untuk tahun 2000 sampai tahun 2002 terus meningkat sebesar 285.343,194 juta rupiah tahun 2000, 313.947,225 juta rupiah tahun 2001 sehingga tahun 2002 mencapai 444.053,139 juta rupiah.

Perkembangan dana yang terhimpun di BPD Yogyakarta dari tahun ketahun mengalami peningkatan, bias dilihat paa tabel 5.1 untuk tahun 1985 – 1997 penghimpunan dana pada BPD Yogyakarta terus naik, walaupun pada tahun 1998 mengalami penurunan yang yang besar yaitu sebesar dari 453.295,141 juta rupiah pada tahun 1997, menjadi 203.750,876 juta rupiah pada tahun 1998 sampai tahun 1999 dana yang terhimpun masih mengalami penurunan sebesar 200.178,837 juta rupiah, walaupun pada tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar 385.220,204 juta rupiah tahun 2000, 649.142,935 juta rupiah tahun 2001 dan akhirnya pada tahun 2002 mencapai 859.239,019 juta rupiah.

Perkembangan PDRB dari tahun ketahun mengalami perubahan yang berbeda-beda d athun 1986 PDRB turun dari yang semula 3.959.434, juta rupiah pada tahun 1985 menjadi 3.765.801 juta rupiah walaupun pada tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan sampai tahun 1998 PDRB mengalami penurunan yaitu sebesar 4.685.777 juta rupiah dari 5.286.367 juta rupiah pada tahun 1997, kemudian pada tahun 1999 sampai tahun 2002 perlahan-lahan naik samapai mencapai 5.357.669 juta rupiah pada tahun 2002.

Pada suku bunga kredit dari tahun 1985 –2002 tidak ada mengalami perubahan yang sangat besar hanya saja pada tahun 1998 suku bunga kredit mencapai

23,16 persen walaupun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan lagi sebesar 17,8 % samapi dengan tahun 2002 mencapai 17,02 %.

4.2. Hasil Analisis Regresi

Proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan komputer dalam paket E-Views sedangkan operasi regresinya menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier, dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 D$$

Dimana :

Y = Kredit Usaha Kecil (juta rupiah)

X₁ = Jumlah Dana Bank Pembangunan Daerah (juta rupiah)

X₂ = Suku Bunga Kredit (%)

X₃ = PDRB (juta rupiah)

D = Dummy variabel sebagai pengukur krisis ekonomi tahun 1997

D = 0 sebelum ada krisis moneter pada tahun 1997

D = 1 setelah ada krisis moneter pada tahun 1997

β_0 = konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi.

Analisis data linier dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah dana yang terhimpun BPD, Suku bunga kredit, PDRB dan variable Dummy (krisis moneter) terhadap KUK. Berdasarkan tabel 5.2 diatas diperoleh persamaan regresi dengan menggunakan regresi linier adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 D$$

$$Y = 1.36E+08 + 0.430034 X_1 - 789.3964 X_2 - 26.61022 X_3 + 54430285 D$$

Tabel 4.2
Hasil Analisa Regresi
Data Variabel Dependen (KUK)

| Variabel Independen | Koefisien Regresi | Standar Error | T- Hitung | Sig |
|---------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| C | 1.36E+08 | 91213654 | 1.493122 | 0.1593 |
| X1 | 0.430034 | 0.056886 | 7.559548 | 0.000 |
| X2 | -789.3964 | 9186.318 | -0.085932 | 0.9328 |
| X3 | -26.61022 | 24.23024 | -1.098224 | 0.2920 |
| X4 | 54430285 | 23643825 | 2.302093 | 0,0385 |
| R-Squared | = 0.925687 | Mean of dependen var | = 1.63E+08 | |
| Adjusted R-Squared | = 0.902821 | S.D of dependen Var | = 94714703 | |
| S.E. of Regresion | = 29525870 | Akaike Info criterion | = 37.46956 | |
| Sum Squared Resid | = 1.13E+16 | Schawarrz criterion | = 37.71689 | |
| Log likelihood | = -332.2261 | F-Statistik | = 40.48391 | |
| Durbin Watson Stat | = 1,996 | Prob (F-stat) | = 0.000000 | |

4.3 Pengujian Statistik

Pengujian statistik terdiri dari uji F-test untuk melihat tingkat signifikan keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan uji t-test adalah untuk melihat tingkat signifikan nilai koefisien estimasi secara individu. Dan uji t-test pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Sedangkan R-Squared (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel independen dengan variabel dependen.

4.3.1. Pengujian Koefisien Regresi Secara Serempak (F-Statistik)

Pengujian ini untuk menguji secara keseluruhan model regresi apakah memang terdapat hubungan antara variabel independen (Dana yang terhimpun, Suku bunga kredit, PDRB, dan Variabel Dummy) secara bersama-sama dengan variabel dependen (KUK).

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$1). H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0,$$

Artinya jumlah dana BPDY, suku bunga kredit, PDRB Yogyakarta, dan krisis moneter tahun 1997 secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit usaha kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta.

$$2). H_a : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0,$$

Artinya jumlah dana BPDY, suku bunga kredit, PDRB, dan krisis moneter pada tahun 1997 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kredit usaha kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini berarti variable independen (dana yang terhimpun, suku bunga kredit, PDRB, dan Dummy) secara serempak mempengaruhi variable dependen (KUK) dengan signifikan. Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak hal ini berarti variabel independen (Dana yang terhimpun, Suku bunga kredit, PDRB dan Dummy) secara serempak tidak mempengaruhi variabel dependen (KUK) dengan signifikan.

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ maka diperoleh F-tabel adalah sebagai berikut

$$F\text{-tabel dengan } \alpha = 5\%$$

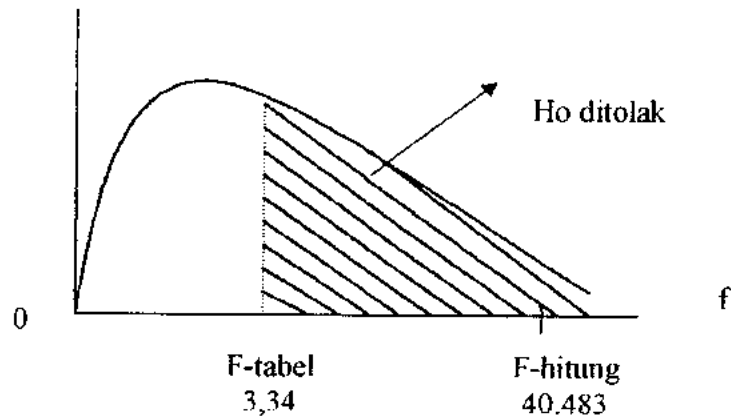
$$F\text{-tabel} = f_{\alpha ; k - 1 ; n - k}$$

$$F\text{-tabel} = f_{0,05 ; 3 ; 14}$$

$$F\text{-tabel} = 3,34$$

berdasarkan perhitungan pada tabel 4.2 maka diperoleh nilai $F\text{-hitung} = 40,48391$ dan dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ dan $dk (3, 14)$ diperoleh $F\text{-tabel} = 3,34$ jadi $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka dapat diambil kesimpulan menolak H_0 dan menerima H_a sehingga dapat dikatakan bahwa secara serempak variabel Dana yang terhimpun, Suku bunga kredit, PDRB, dan Dummy berpengaruh secara signifikan terhadap KUK.

Gambar 4.1
Uji F-Statistik



4.3.2. Pengujian Koefisien Regresi secara Individu (t-statistik)

4.3.2.1. Pengujian Koefisien Regresi Terhadap Dana Yang Terhimpun (X1)

$H_0 : \beta_1 = 0$ Secara Individu Variabel X1 tidak mempengaruhi penyaluran kredit usaha kecil secara signifikan.

$H_a : \beta_1 > 0$ Secara individu X1 berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyaluran kredit usaha kecil

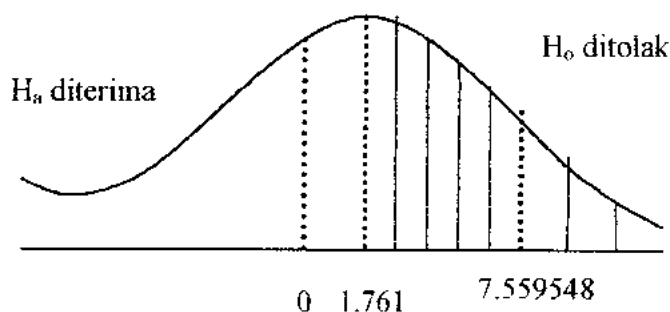
Jika t-hitung < t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya variabel dana yang terhimpun (X1) tidak mempengaruhi penyaluran KUK secara signifikan.

Jika t-hitung > t-tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya adalah variabel dana yang terhimpun mempengaruhi penyaluran KUK secara signifikan.

Tanda koefisien regresi X1 adalah sebesar 0,430034 dan dari hasil perhitungan regresi diperoleh nilai t-hitung sebesar 7,559548 dengan menggunakan α

5 % maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,761. karena t-hitung (7.559548) > t-tabel (1,761) maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel Dana yang terhimpun (X1) dengan uji satu sisi berpengaruh secara nyata terhadap penyaluran kredit usaha kecil oleh BPD Yogyakarta atau ada hubungan yang signifikan antara dana yang terhimpun dengan penyaluran KUK.

Gambar 4.2
Uji t Dana yang terhimpun (X1)



4.3.2.2. Pengujian Koefisien Regresi Terhadap Suku Bunga Kredit

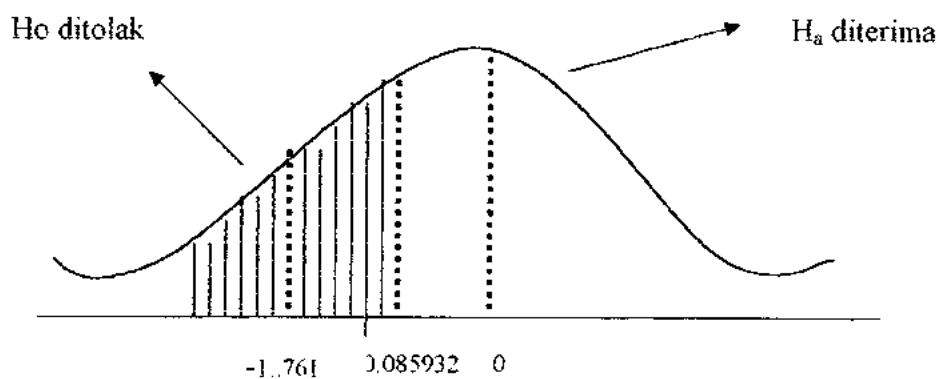
$H_0 : \beta_2 = 0$ Secara Individu Variabel suku bunga kredit (X2) tidak mempengaruhi penyaluran kredit usaha kecil secara signifikan.

$H_a : \beta_2 > 0$ Secara individu Suku Bunga Kredit (X2) berpengaruh positif secara Signifikan terhadap penyaluran kredit usaha kecil

Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya variabel suku bunga kredit (X_2) tidak mempengaruhi penyaluran KUK secara signifikan. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya adalah variabel suku bunga kredit mempengaruhi penyaluran KUK secara signifikan.

Tanda koefisien regresi X_2 adalah sebesar -789.3964 dan dari hasil perhitungan regresi diperoleh nilai $t\text{-hitung}$ sebesar -0.085932 dengan menggunakan $\alpha 5\%$ maka diperoleh nilai $t\text{-tabel}$ sebesar $1,761$. karena $t\text{-hitung} (0,777) < t\text{-tabel} (1,761)$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa variabel Suku bunga (X_2) dengan uji satu sisi tidak berpengaruh secara nyata terhadap penyaluran kredit usaha kecil oleh BPD Yogyakarta atau tidak ada hubungan yang signifikan antara suku bunga kredit dengan penyaluran KUK

Gambar 4.3
Uji t- Suku Bunga Kredit



4.3.2.3. Pengujian koefisien Regresi terhadap Variabel PDRB

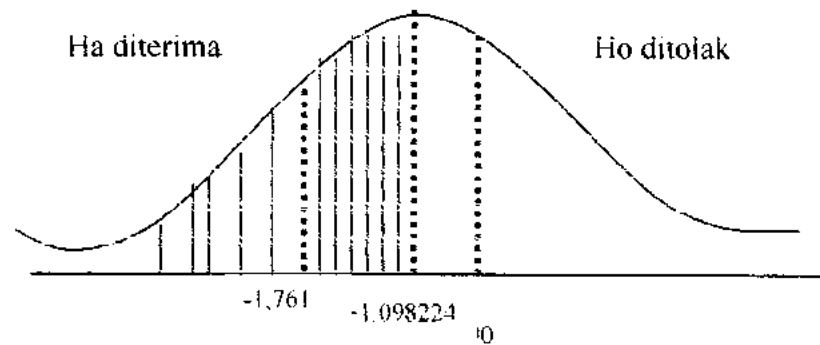
$H_0 : \beta_3 = 0$ Secara Individu Variabel PDRB (X3) tidak mempengaruhi penyaluran kredit usaha kecil secara signifikan.

$H_a : \beta_3 > 0$ Secara individu variabel PDRB (X3) berpengaruh positif secara Siginifikan terhadap penyaluran kredit usaha kecil

Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya variabel PDRB (X3) tidak mempengaruhi penyaluran KUK secara signifikan. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya adalah variabel PDRB mempengaruhi penyaluran KUK secara signifikan.

Tanda koefisien regresi X3 adalah sebesar -26.61022 dan dari hasil perhitungan regresi diperoleh nilai $t\text{-hitung}$ sebesar -1.098224 dengan menggunakan $\alpha 5\%$ maka diperoleh nilai $t\text{-tabel}$ sebesar $-1,761$. karena $t\text{-hitung} (-1.098224) < t\text{-tabel} (-1,761)$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa variabel PDRB dengan uji satu sisi tidak berpengaruh secara nyata terhadap penyaluran kredit usaha kecil oleh BPD Yogyakarta atau tidak ada hubungan yang signifikan antara suku bunga kredit dengan penyaluran KUK

Gambar 4.4.
Uji t- PDRB



**4.3.2.4. Pengujian Koefisien Regresi Terhadap Variabel Dummy
(krisis Moneter)**

$H_0 : \beta_4 = 0$ Secara Individu Variabel krisis moneter (X4)
tidak mempengaruhi penyaluran kredit usaha kecil secara signifikan.

$H_a : \beta_4 < 0$ Secara individu krisis moneter (X4)
Berpengaruh negatif secara Siginifikan terhadap penyaluran kredit usaha kecil

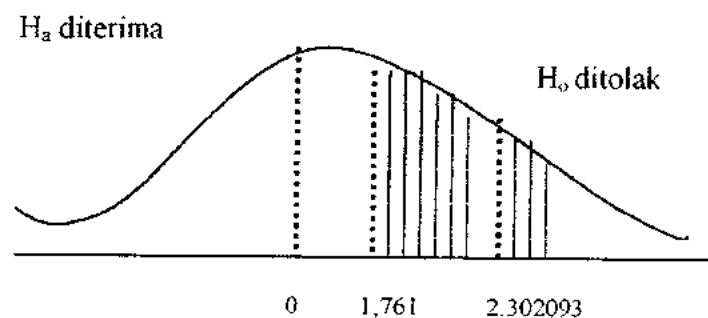
Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya variabel dummy atau krisis moneter (X4) tidak mempengaruhi penyaluran KUK secara signifikan. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya

adalah variabel dummy atau krisis moneter mempengaruhi penyaluran KUK secara signifikan.

Tanda koefisien regresi X4 adalah sebesar 54430285 dan dari hasil perhitungan regresi diperoleh nilai t-hitung sebesar 2.302093 dengan menggunakan α 5 % maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,746. karena t-hitung (2.302093) > t-tabel (1,761) maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel Krisis moneter (X4) dengan uji satu sisi berpengaruh secara nyata terhadap penyaluran kredit usaha kecil oleh BPD Yogyakarta atau ada hubungan yang signifikan antara dana krisis moneter dengan penyaluran KUK

Gambar 4.5

Uji t- Krisis moneter



4.3.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berganda (R^2) = 0.925687 dan koefisien determinasi yang disesuaikan (R - adjusted) = 0.902821 menunjukkan tingkat ketepatan (Godness of fit) dari hubungan fungsi tersebut adalah 0.925687 yang artinya 92.56 % variabel dependen (KUK) dipengaruhi oleh variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4) sedangkan sisanya 7.44 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

4.4. Pengujian Asumsi Klasik

4.4.1. Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya, atau dengan kata lain variabel independennya yang satu merupakan fungsi dari variabel-variabel independen lainnya. Pada lampiran dapat dilihat bahwa dengan menggunakan bantuan komputer yang sesuai dengan uji Kleins yang dipakai dalam penelitian ini maka dapat diperoleh nilai-nilai yang dapat dilihat dalam tabel

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas

| Variabel | R² | r² | Kesimpulan |
|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| X1 - X2,X3,X4 | 0.925687 | 0.612405 | Tidak terjad Multikoliniearitas |
| X2 - X1,X3,X4 | 0.925687 | 0.141893 | Tidak terjadi Multikoliniearitas |
| X3 - X1,X2,X4 | 0.925687 | 0.768099 | Tidak terjadi Multikoliniearitas |
| X4 - X1,X2,X4 | 0.925687 | 0.610139 | Tidak terjadi Multikoliniearitas |

Berdasarkan teori yang diajukan Kleins Rule Of Temp menyatakan bahwa, multikolinieritas tidak usah dirisaukan apabila R² regresi model lebih besar dari pada r² regresi antar variabel penjelas, maka setelah dilakukan pengujian dengan komputer maka besarnya r² regresi antar variabel penjelas lebih kecil dari pada R² model regresi awal. Dari hasil pengujian terhadap multikoliniearitas matrik kurang dari 0.925687 yang berarti tidak terdapat multikoliniearitas sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (dana yang terhimpun, suku bunga kredit, PDRB, dan krisis moneter) tidak terjadi multikoliniearitas dalam regresi yang dilakukan.

4.4.2. Heteroskedasitas

Heteroskedasitas terjadi apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang sama untuk semua observasi. Akibatnya penaksiran OLS tetap tidak bias dan tidak efisien. Heteroskedasitas dapat di deteksi dengan menggunakan uji Park. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat Heteroskedasitas

H_a : Terdapat Heteroskedasitas

Dengan menentukan hipotesis yang menyatakan jika hasil perhitungan menghasilkan t-hitung yang signifikan atau t-hitung > t-tabel maka dapat dikatakan terdapat heteroskedasitas atau H_0 ditolak. Jika t-hitung < t-tabel maka dapat dikatakan dalam persamaan tidak terjadi heteroskedasitas atau H_0 diterima.

Tabel 4.4.
Uji Heteroskedastisitas Dengan Menggunakan Uji Park

| Variabel Penjelas | t-hitung | t-tabel | Kesimpulan |
|----------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| X1 | -0.765441 | ± 1.761 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| X2 | -0.765441 | ± 1.761 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| X3 | 0.730798 | ± 1.761 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| X4 | 1.032344 | ± 1.761 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |

Dari tabel diatas dengan menggunakan uji park terlihat bahwa t-hitung dari masing-masing variabel independen lebih kecil dari t-tabel ternyata tidak signifikan sehingga dapat dikatakan H_0 diterima atau tidak terjadi heterokedstisitas.

4.4.3. Autokorelasi

Autokorelasi dapat terjadi apabila kesalahan gangguan (Error disturbance) suatu periode berkorelasi dengan kesalahan sebelumnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

H_0 : Tidak ada autokorelasi positif

H_a : Tidak ada autokorelasi negatif

Jika $DW < d_l$ dan $DW > 4 - d_l$, maka H_0 dan H_a^* ditolak

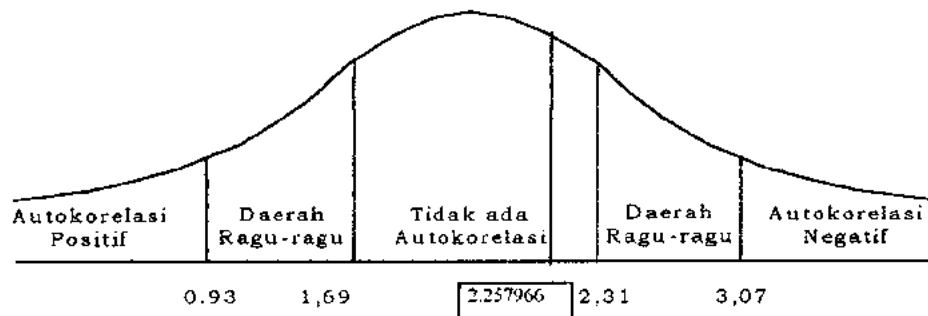
Jika $DW > d_u$ dan $DW < 4 - d_u$, maka H_0 dan H_a^* diterima

Jika $d_l < DW < d_u$ dan $4 - d_u < DW < 4 - d_l$, maka H_0 dan H_a^* berada pada daerah keragu-raguan.

Berdasarkan perhitungan komputer dengan program E-Views maka diperoleh nilai DW sebesar 2.257966 dengan menggunakan $\alpha = 0,05$ maka nilai DW untuk d_l sebesar 0,93 dan nilai DW untuk d_u sebesar 1,69 perhitungan komputer yang diperoleh setelah meregresikan data yang ada, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam analisis ini tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif, ini dilakukan dengan melihat nilai DW yang diperoleh sebesar 2.257966 berarti terletak pada

daerah H_0 dan H_0^* diterima, yaitu terletak pada $DW > d_u$ dan $DW < 4 - d_u$ adalah $2.257966 > 1,69$ dan $2.257966 < 4 - 1,69$

Gambar 4.6
Uji Durbin Watson



Dari hasil regresi awal diperoleh nilai DW sebesar 2.257966 dan terletak didaerah menerima H_0 atau H_0^* atau kedua-duanya artinya tidak terdapat korelasi baik positif maupun negatif.

4.5. Interpretasi Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi maka diperoleh nilai dari masing-masing variabel bebas dengan pengujian masing-masing variabel sebagai berikut :

- a. Tanda parameter untuk koefisien regresi Dana yang terhimpun adalah positif sebesar 0,430034 dan hasil perhitungan diperoleh besarnya t-hitung 7,559548 dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ nilai t-tabel = 1,761 karena t-hitung $>$ t-tabel maka Dana yang terhimpun (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran KUK. Jadi dengan menganggap variabel lain tetap, jika Dana yang terhimpun naik sebesar 1 juta rupiah maka KUK akan naik sebesar 0,430034 juta rupiah dengan arah yang positif.
- b. Tanda parameter untuk koefisien regresi suku bunga (X_2) adalah negatif sebesar 789,3964 dan hasil perhitungan diperoleh t-hitung = -0,85932 dengan menggunakan $\alpha 5\%$ nilai t-tabel 1,761 karena t-hitung $<$ t-tabel maka suku bunga kredit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran KUK. Suku bunga kredit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran KUK di BPD, karena suku bunga yang digunakan adalah suku bunga kredit umum yang ada pada Bank Indonesia, ini dikarenakan sulitnya mendapatkan data suku bunga kredit usaha kecil, maka menggunakan data proxy sebagai pengganti data suku bunga kredit usaha kecil yang menyebabkan pengaruhnya tidak ada sama sekali dengan penyaluran KUK di BPD itu sendiri

- c. Tanda parameter untuk koefisien regresi PDRB (X_3) adalah negatif sebesar -26.61022 dan hasil perhitungan diperoleh $t\text{-hitung} = -1.098224$ dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ nilai $t\text{-tabel} = 1,761$ karena $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran KUK di BPD Yogyakarta. PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran KUK di BPD Yogyakarta. PDRB tidak ada pengaruhnya dengan penyaluran KUK di BPD Yogyakarta ini disebabkan mungkin dengan kebijakan atau ketetapan pemerintah yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/2/PBI/2001 tentang "Pemberian Kredit Usaha Kecil", dengan pembagian plafon dan jumlah asset debitur sehingga perubahan terhadap PDRB dengan jumlah berapapun tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan KUK itu sendiri.
- d. Tanda parameter untuk koefisien regresi krisis moneter bertanda positif sebesar 54430285 dan hasil perhitungan diperoleh $t\text{-hitung} = 2.302093$ dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ nilai $t\text{-tabel} = 1.761$ karena $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka krisis moneter berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran KUK di BPD Yogyakarta. Jadi dengan menganggap variabel lain tetap, adanya krisis moneter menyebabkan meningkatnya penyaluran KUK di BPD Yogyakarta sebesar $54.430,285$ juta. Krisis moneter signifikan terhadap KUK ini disebabkan dengan terjadinya krisis moneter menyebabkan banyaknya perusahaan yang mengalami gulung tikar

sehingga perlu bantuan suntikan dana yang berupa kredit usaha kecil itu sendiri guna membantu perusahaan tersebut yang menyebabkan penyaluran KUK setelah terjadinya krisis moneter meningkat .

- e. Menurut hasil pengujian secara keseluruhan (uji F), nilai F-hitung sebesar 40.48391 lebih besar dai pada F-tabel 3,34, berarti semua variabel secara keseluruhan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel tidak bebas.
- f. Penafsiran koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.925687, hal ini berarti variabel-variabel bebas dapat menjelaskan sebesar 92,56 % dan sisanya sebesar 7,44 % dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas lainnya yang tidak terdapat dalam model.
- g. Berdasrkan uji ekonometri tentang penyimpangan asumsi klasik yaitu pada uji multikolinieritas, heterokedasitas dan autokorelasi yang hasilnya menunjukkan tidak adanya multikolinieritas, heterokedasitas, dan autokorelasi sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan lolos dari pengujian asumsi klasik.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBLIJAKAN

5.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian dan analisa adalah sebagai berikut :

- a. Variabel dana yang terhimpun (X_1) bertanda positif sebesar 0,430034 dan hasil perhitungan diperoleh besarnya t-hitung 7.559548 dengan menggunakan α 5 % nilai t-tabel 1,761 karena t-hitung > t-tabel maka dana yang terhimpun berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran KUK oleh BPD Yogyakarta.
- b. Tanda parameter untuk koefisien regresi suku bunga kredit (X_2) adalah negatif sebesar -789.3964 dan hasil perhitungan diperoleh -0.085932 dengan menggunakan α 5 % nilai t-tabel 1,761 karena t-tabel > t-hitung maka suku bunga kredit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran KUK oleh BPD Yogyakarta.
- c. Tanda parameter untuk koefisien regresi PDRB (X_3) adalah negatif sebesar -26.61022 dan hasil perhitungan diperoleh -1.098224 dengan menggunakan α 5 % nilai t-tabel 1,761 karena t-tabel > t-hitung maka PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran KUK oleh BPD Yogyakarta.
- d. Variabel krisis moneter (X_4) bertanda positif sebesar 54430285 dan hasil perhitungan diperoleh besarnya t-hitung 2.302093 dengan

menggunakan α 5 % nilai t-tabel 1,761 karena t-hitung > t-tabel maka krisis moneter berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran KUK oleh BPD Yogyakarta.

- e. Pengujian variabel independen secara serempak ditunjukkan F-hitung sebesar 40.48391 dan berada didaerah penolakan H_0 , artinya X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyaluran KUK oleh BPD Yogyakarta
- f. R^2 sebesar 0.925687 yang berarti 92,56 % variasi dalam penyaluran KUK oleh BPD Yogyakarta mampu dijelaskan oleh variabel dana yang terhimpun, suku bunga kredit, PDRB dan krisis moneter, sedangkan 7,44 % dipengaruhi oleh variabel diluar model.
- g. Berdasarkan uji ekonometri tentang penyimpangan asumsi klasik yaitu pada uji multikolinieritas, heterokedasitas dan autokorelasi sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan lolos dari pengujian asumsi klasik.

5.2. Implikasi Kebijakan

- a. Pihak BPD diharapkan dapat membuka jaringan kantor yang baru dan dapat terjangkau ke daerah-daerah sehingga akan lebih mudah bagi pemakai kredit untuk menemukan dan mengajukan kredit pada kantor bank terdekat, semakin banyaknya jumlah bank akan menambah penghimpunan dana yang tertumpun dari masyarakat sehingga penyaluran akan kredit juga akan meningkat.
- b. Bank BPD harus bisa menjaga kestabilan perekonomian secara makro yang telah menjadi bagian dari kebijakan manajemen Bank BPD itu sendiri agar dapat mengatasi krisis-krisis ekonomi yang kelak akan terjadi sehingga Bank BPD tetap dapat menjadi andalan bagi masyarakat Yogyakarta didalam penyaluran kredit khususnya kredit usaha kecil itu sendiri.
- c. Pihak BPD diharapkan agar dapat melakukan suatu terobosan untuk dapat menyaring masyarakat dalam pemberian kredit dimana persaingan yang begitu pesat di dunia perbankan.